

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
(LKM-A PUAP) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2013**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syaria'ah**

**Oleh :
FIKRI AMRULLAH
NIM. 092323002**

**PROGRAM SETUDI EKONOMI SYARIAH
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

2014

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Fikri Amrullah
NIM : 092323002
Jenjang : S-1
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ **Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013**” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 15 September 2014

Saya yang menyatakan,



Fikri Amrullah
NIM. 092323002



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
Alamat: Jl.Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto, 53126
Telp. 0281- 635624, 628250 Fax. 0281- 636553 www.stainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A PUAP)
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2013**

yang disusun oleh saudara/i: **Fikri Amrullah**, NIM. 092323002, Program Studi: Ekonomi Syari'ah, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 25 September 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syari'ah (S.E. Sy.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang

Dr. H. Naqiyah, M. Ag.
NIP. 19630922 199002 2 001

Sekretaris Sidang

Iin Splikhin, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Pembimbing/Penguji Utama

M. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

Anggota Penguji

H. Sochimir, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Anggota Penguji

Ahmad Dahlan, M.S.I
NIP. 19731014 200312 1 002



Purwokerto, 02 Desember 2014
Ketua STAIN Purwokerto

Dr. H. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Fikri Amrullah, NIM : 092323002 yang berjudul:

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS (LKM-A)
PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PEDESAAN
DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Syari'ah (S.E.Sy).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 September 2014
Pembimbing,



M. Bachrul Ulum, SH, M.H
NIP. 19720906 200003 1 002

**PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
(LKM-A PUAP) DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT
DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2013**

Fikri amrullah

Program Studi Ekonomi Syari'ah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Agenda pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, revitalisasi pertanian dan pedesaan. Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, pedagang, buruh. Namun demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan. Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi entry point terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseatch*) dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini adalah LKM-A PUAP Kab. Purbalingga Tahun 2010, Metode penelitian kualitatif, pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta teknik panganalisa data yang digunakan adalah teknik analisa deskriptif, analisis SWOT dan Matrik SWOT.

Berdasarkan hasil penelitian, LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga dalam upayannya mengembangkan ekonomi pedesaan khususnya Petani dan UKM dengan menggunakan analisis SWOT kemudian memasukan komponen-komponen tersebut melalui matrik SWOT diperoleh straregi SO (*Strengths Opportunities*), ST (*Strengths Threats*), WO (*Weakness Opportunities*), WT (*Weakness Threats*), diantaranya LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga perlu peningkatan kinerja dari segi pelayanan yang profesional terhadap mitra di pedesaan berdasarkan prinsip ekonomi syari'ah, LKM-A PUAP juga harus selalu konsisten dan terus menajamkan fokus transaksinya ke wilayah usaha kecil sehingga muncul pemerataan modal dari dalam sirkulasi pembiayaan.

Kata Kunci : LKM-PUAP, Pemberdayaan, Ekonomi Pedesaan, SWOT

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158/ 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	za	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik ke atas

غ	'ain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y'	ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

Ta'marbuḥah diakhir kata bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- b. Bila ta'marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

Vokal Pendek

اَ	Fathah	ditulis	a
اِ	Kasrah	ditulis	i
اُ	ḍamah	ditulis	u

Vokal Panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	Ḍamah + wāwu mati	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>Furūd'</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>

2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>au</i>
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>A'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>La'in syakartum</i>

Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkannya *I (el)*nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syamss</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyai atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>Zawī al-furūd'</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013”. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah bagi Rasulullah SAW, keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman.

Penulis menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah, kekurangan merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tak terbantahkan, begitu pula dengan karya-karyanya. Namun manusia wajib berusaha menuju kearah mendekati kesempurnaan. Demikian dengan sajian penulis ini tentu masih banyak hal yang perlu disempurnakan. Tetapi untuk melangkah sampai disini, penulis tidaklah berjalan sendiri, melainkan dengan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa dalam penulisan tugas akhir maupun keseharian kehidupan penulis.

Penyusun mengucapkan terimakasih setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. A Lutfi Hamidi, M.Ag selaku Ketua STAIN Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I STAIN Purwokerto, Drs. H. Anshori, M.Ag, Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto, dan Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pmbantu Ketua III STAIN Purwoketo.
3. Dr. H. Syufaat M.Ag selakuKetuaJurusan Syari'ah.
4. Ahnad Dahlan Rosyidin, M.S.I, Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Islam.

5. M. Bachrul Ulum, SH., MH selaku Pembimbing yang dengan penuh kesadaran telah membimbing dan telah banyak membantu penulis dalam menyusun skripsi ini.
6. General Manager LKM-A PUAP di masing-masing Desa Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 yang telah bersedia dijadikan objek penelitian.
7. Team teknis Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan dan Pembantu Mitra Tani (PMT) Kabupaten Purbalingga.
8. Serta kepada keluarga dan teman-teman tercinta atas semangat dan dukungannya.

Secara khusus terima kasih yang tak terhingga disampaikan kepada semuateman-teman Prodi Ekonimi Islam yang telah memberikan semangat, dukungan, saran dan masukannya atas terselesainya Skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pembaca sekalian serta mampu meningkatkan mutu dan efektivitas pembelajaran.

Akhir kata, semoga dukungan, dorongan, bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 15 September 2014

Fiki Amrullah
NIM. 092323002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL/ BAGAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telah Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A PUAP).....	13
1. Pengertian	13
2. Dasar Hukum	13
3. LKM-A PUAP dan Kondisi.....	14
B. Model - model LKM-A PUAP di Indonesia	15
C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	17

1. Pengertian	17
2. Landasan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat.....	20
3. Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Rakyat	20
D. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Dengan Ekonomi Islam	23
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	27
B. Subjek dan Objek Penelitian	28
C. Tempat Dan Waktu Penelitian	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	31
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	35
1. Gambaran umum LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga..	35
2. Visi Misai LKM-A PUAP.....	38
3. Struktur Organisasi LKM-A PUAP.....	39
4. Job Discription (Uraian Tugas).....	40
5. Produk LKM-A PUAP Dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan	44
6. Pembinaan dan Pendampingan Usaha.....	50
7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.....	52
B. Analisis Peran LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga.....	54
C. Analisis SWOT LKM-A PUAP Dalam Pembangunan Ekonomi	

	Pedesaan	56
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	79
	B. Saran-Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL/ BAGAN

1.	Tabel 1. Rencana Strategi Berdasarkan SWOT	33
2.	Tabel 2. Penyaluran PUAP di Kabupaten Purbalingga	37
3.	Tabel 3. Struktur Organisasi LKM-A PUAP	40
4.	Tabel 4. Kekuatan LKM-A PUAP.....	57
5.	Tabel 5. Kelemahan LKM-A PUAP	59
6.	Tabel 6. Peluang LKM-A PUAP	61
7.	Tabel 7. Ancaman LKM-A PUAP.....	62
8.	Tabel 8. Matrik SWOT LKM-A PUAP.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agenda pembangunan nasional Indonesia difokuskan pada penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, peningkatan kesempatan kerja, *revitalisasi* pertanian dan pedesaan. Memperbincangkan pembangunan, khususnya di negara berkembang, tidak bisa terlepas dari wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan sebagian besar penduduk di negara berkembang masih bermukim di daerah pedesaan dan mayoritas masih dalam kondisi miskin. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan di negara berkembang dapat dilihat dari perkembangan di wilayah pedesaan itu sendiri.¹

Sesuai dengan pencitraan pedesaan pada umumnya, komunitas pedesaan identik dengan para petani dan kehidupan para petani. Oleh karena itu, kehidupan pedesaan tidak lepas dari perilaku ekonomi yang khas dari keluarga petani yaitu pola kelembagaan ekonomi pedesaan yang belum dapat meninggalkan ciri masyarakat ekonomi pertanian yang berorientasi subsisten.² Kegiatan perekonomian di pedesaan masih didominasi oleh usaha-usaha skala mikro dan kecil dengan pelaku utama para petani, buruh tani, pedagang sarana produksi dan hasil pertanian, pengolah hasil pertanian, pengrajin, buruh serta pengecer. Namun

¹ Ahmad Earni Yustika, *Ekonomi Kelembagaan: Definisi, Teori, dan Strategi* (Jakarta: Banyumedia Publising, 2002), hlm.67.

² James C. Scott, *Moral Ekonomi Pertanian : Pengolahan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. (Jakarta: LP3ES. 1981), hlm. 26.

demikian, para pelaku usaha ini pada umumnya masih dihadapkan pada permasalahan klasik yaitu terbatasnya ketersediaan modal. Sebagai unsur esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat pedesaan, keterbatasan modal dapat membatasi ruang gerak aktivitas sektor pertanian dan pedesaan.³ Dalam jangka panjang, kelangkaan modal bisa menjadi *entry point* terjadinya siklus rantai kemiskinan pada masyarakat pedesaan yang sulit untuk diputus.

Pembangunan ekonomi yang berbentuk badan usaha mengalami perkembangan serta mendapatkan posisi penting dalam mensejahterakan masyarakat. Alokasi anggaran pembangunan di sektor ini hampir cukup besar dari total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah di setiap daerah. Banyak program yang telah dijalankan untuk memberdayakan UKM sejak hampir 20 tahun yang lalu, meskipun hasilnya sampai saat ini belum mengembirakan. Oleh karena itu, perlu dicarikan format yang sama sekali baru agar UKM tidak jalan di tempat. Dibutuhkan pula usaha-usaha strategis guna memberdayakan Petani dan UKM agar dapat menjadi penopang perekonomian seperti di Jepang dan Taiwan. Pada tahun 2005, perbankan menargetkan akan menyalurkan kredit kepada sektor UKM sebesar Rp 60,4 triliun. Meski kredit yang di kucurkan berjumlah cukup besar, namun perkembangan usaha mikro/kecil di Indonesia masih terhambat persoalan sehingga perdagangan produk UMKM belum

³ Soeharsono Sangir, *Kapita Selekta Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 608.

menunjukkan hasil maksimal.⁴ Baru pada tahun 2008 Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah melaksanakan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di bawah koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri) dan berada dalam kelompok program pemberdayaan masyarakat.

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Team Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 146.1/Kpts. 320/3/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.⁵ Untuk melaksanakan fasilitas bantuan permodalan GAPOKTAN Penerima PUAP di Kabupaten Purbalingga membentuk LKM-A PUAP (Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis).

Dalam iklim ekonomi yang serba berdimensi ganda tersebut, adanya Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A PUAP) yang bergerak atas bantuan Departemen Pertanian dan pemerintah diharapkan mampu menjadi alternatif bagi pengembangan ekonomi masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKM-A PUAP adalah suatu program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap pembangunan pertanian dalam arti luas, menjadi mitra khusus petani dalam mengembangkan usaha agribisnis dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan dan hambatan yang

⁴ *Ibid.*, hlm. 615.

⁵ <http://database.deptan.go.id/puap/tampil.php?page=pedum>

dihadapi oleh petani terutama di sektor permodalan, sarana produksi dan pemasaran. Hal ini di maksudkan agar masyarakat dapat terbantu dan menjauhkan diri dari system transaksi dan iklim usaha ekonomi yang Merugikan.

LKM-A PUAP pada prakteknya tidak sedikit mendapatkan beragam hambatan terutama dalam menguatkan kesejahteraan masyarakat/nasabahnya. LKM-A PUAP Menganut azaz Syariah yang dapat berupa bagi hasil keuntungan maupun jasa, manajemen ini dijelaskan bertujuan untuk menghindari adanya unsur *ribawi*, yang akan merugikan dan membebani nasabah khususnya petani. Dengan mengusung Misi Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) sebagai gerakan pembebasan dari ekonomi *ribawi*, gerakan pemberdayaan masyarakat, dan gerakan keadilan sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar PUAP yang penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan Khususnya masyarakat menengah ke bawah. Visi menjadi Lembaga Keuangan Mikro yang sehat dan sesuai Syari'at Islam, berkembang dan terpercaya yang mampu melayani anggota dan masyarakat lingkungannya mencapai kehidupan penuh keselamatan dan kesejahteraan.⁶

LKM-A PUAP Dituntut untuk bisa menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana , yang memiliki potensi mengembangkan kesejahteraan ekonomi masyarakat.⁷

⁶ Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO Managerial LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

⁷ Rachmat Hendayana, "Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis," <http://puap.deptan.go.id/>, 2008, diakses 29 Sep 2013 pukul 08.27.

Pada umumnya system penyaluran dana (*Funding dan Financing*) yang di terapkan pada LKM-A PUAP terbagi dalam 3 jenis akad Pembiayaan *Musyarokah, Mudharabah* dan Pembiayaan Jual Beli *Al-Murabahah*.

Untuk mendapatkan pinjaman bagi para calon nasabah ada prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Sebelum nasabah mendapat pinjaman dari LKM-A PUAP, calon nasabah harus membuat RUA/RUK (Rencana Usaha Anggota atau Kelompok) dan bersedia disurvei. Tujuan dari RUA dan survey ini adalah untuk mendapatkan gambaran situasi dan kondisi Usaha ekonomi nasabah. Pihak LKM-A PUAP berhak (wajib) memberikan penilaian ini dilakukan untuk memperjelas syarat-syarat yang telah disetujui bersama apabila kemudian hari nasabah berpotensi tidak melunasinya. Syarat untuk mendapatkan pinjaman salah satunya adalah adanya tujuan pinjaman yang jelas Halal dari calon nasabah yang memiliki jaminan pinjaman.⁸

Dalam sisitem pembiayaan pada preteknya rentan dengan tumbuhnya masalah. Pada umumnya masalah timbul dari pihak nasabah yang menunda secara sengaja atau tidak sengaja (tidak mampu) dalam menyelesaikan pelunasan. Setelah terjadi pembiayaan bermasalah LKM-A PUAP melakukan tindakan dengan tahapan berjenjang, mulai tindakan secara musyawarah (kekeluargaan) seperti memberi peringatan melalui surat, menagih langsung kepada nasabah sampai dengan menyita barang,

⁸ Wawancara dengan Jarot, Kepala BPKP Purbalingga Dalam acara "Rapat Kordinasi dan Evaluasi PUAP". 20 Juni 2013, pukul 11.00.

jika tindakan tersebut tidak berhasil, maka pihak LKM-A PUAP akan bertindak lebih tegas dengan penyelesaian melalui badan arbitrase syari'ah, untuk menghindari pembiayaan bermasalah, LKM-A PUAP harus bisa mengatur kebijakan dengan cara melakukan sisitem control.⁹

Untuk mengetahui apakah peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKM-A PUAP berdampak pada usaha ekonomi rakyat, maka perlu adanya kajian yang lebih mendalam tentang hal-hal yang terkait dengan faktor-faktor yang berdampak pada usaha pedagang, pertanian dan kelompok tani GAPOKTAN. Bertitik tolak dari kondisi tersebut diatas maka menarik untuk diteliti mengenai "Peran Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis LKM-A Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat di Kabupaten Purbalingga Tahun 2013".

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut di atas, tampak bahwa kajian terhadap LKM-A PUAP layak untuk dilakukan. Adapun permasalahan yang perlu dibahas dalam sekripsi ini adalah:

1. Bagaimana Peran LKM-A PUAP dalam pembangunan ekonomi pedesaan di Kabupaten Purbalingga tahun 2013?
2. Bagaimana kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga tahun 2013?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

⁹ Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO Managerial LKM-A PUAP tahun 2008-2011

- a. Mengkaji dan menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi Petani dan UKM di desa Kabupaten Purbalingga.
- b. Menganalisis mengenai peran LKM-A PUAP (Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis) dalam mengembangkan ekonomi lokal di desa Kabupaten Purbalingga.
- c. Menentukan strategi yang diperlukan dalam rangka mengembangkan kapasitas LKM-A PUAP

2. Manfaat Penelitian

- a. Memahami system lembaga keuangan mikro dalam perekonomian.
- b. Lebih mengetahui karakter-karakter dari nasabah/ masyarakat dalam menjalankan usahanya
- c. Sebagai bahan evaluasi bagi LKM-A PUAP yang diteliti agar dapat menjadi lembaga yang berkelanjutan dan mampu menopang perekonomian lokal

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka adalah bagian uraian sistematis yang menerangkan keterangan-keterangan dari pustaka dan penulisan terdahulu untuk mendukung dari penulisan yang akan dilakukan.

Sampai saat ini pembahasan mengenai lembaga keuangan mikro sudah ada. Seperti yang dilakukan Rachnat Hendayana dan Sjahrul Busman "*Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Prespektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan*", Membahas pengkajian empiris tentang

LKM-A pertanian yang bertujuan untuk mengetahui kinerja LKM-A dan perspektif pembangunan ekonomi pedesaan. Di dalam Praktek Usaha tani diperlukan invasi teknologi guna mendorong peningkatan produktifitas dan produksinya. Kelemahan petani pada inovasi teknologi yang relatif rendah sebagai dampak penguasaan modal usaha tani yang lemah. Untuk mengatasi kekurangan modal usaha tani, petani mengusahakan tambahan modal dari berbagai sumber dana baik dari lembaga keuangan formal (Perbankan) maupun kelembagaan jasa keuangan non formal. Dari hasil penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran keberadaan LKM-A memiliki peran sebagai *intermediasi* aktifitas perekonomian yang tidak dijangkau oleh lembaga Perbankan. Secara faktual LKM-A menunjukkan keberhasilannya namun masih bias ada sektor ekonomi non pertanian. Faktor kritis dalam pengembangan LKM-A sektor pertanian telah pada legalitas Kelembagaan, Kapabilitas pengurus, Kelayakan ekonomi usaha tani, karaktersistik usaha tani, dan bimbingan teknis nasabah/ pengguna jasa layanan LKM-A.¹⁰

Selain itu juga penelitian sekripsi dengan judul, "*Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional Upaya Kongrit Memutus Mata Rantai Kemiskinan*" oleh Wiloejo Wirjo Wijono menjelaskan akibat bahwa keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi UMKM khususnya UKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan, menyebabkan

¹⁰ Rachmat Hendayana dan Sjahrul bustaman, "*Fenomena Lembaga Keuangan Mikro Dalam Prespektif Pembangunan Ekonomi Pedesaan,*" <http://presbank.deptan.go.id>, diakses 09 September 2013.

mereka tergantung pada lembaga informal. Bentuk sumber ini beraneka ragam mulai dari pelepas uang (rentenir) hingga berkembang dalam bentuk unit simpan pinjam, koprasa dan bentuk lainnya yang umumnya sumber modal tersebut mengenakan bunga yang irrasional karena terlalu tinggi dan mengikat. Kondisi ini berdampak buruk, bukan membantu tapi malah menjadikan keterpurukan dalam perekonomian. Dari penelitian ini menghasilkan bahwa LKM-A mampu memberikan pembiayaan-pembiayaan kepada UKM walaupun tidak sebesar lembaga keuangan formal, namun dapat menjadi alternatif yang cukup potensial. LKM-A ini lebih mengena ke kalangan pelaku UKM karena sifatnya lebih fleksibel, misalnya dalam persyaratan dan jumlah pinjaman yang tidak seketat perbankan maupun dalam pencairan kredit. Manfaat potensi belum optimal karena LKM-A masih menghadapi kendala dan keterbatasan SDM dalam pengelolaan LKM-A serta kecukupan modal. Jadi pada intinya Wiloejo menekankan pemberian akses yang luas terhadap sumber-sumber pembiayaan bagi usaha kecil dan Mikro (UKM) yang pada dasarnya bagian dari usaha masyarakat miskin yang mempunyai kemauan dan kemampuan produksi.

Penelitian skripsi Dwi septi Rosita dengan judul "*Peran BMT Khasanah- LPPSLH dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan*" Dalam Penelitian Dwi Septi Rosita bahwa BMT Khasanah-LPPSLH yang terletak di Pasar Cernai Purwokerto Utara Merupakan lembaga keuangan sebagai salah satu mitra dalam pembangunan ekonomi kerakyatan yang di sektor

usaha skala kecil, yang masyarakat kecil seperti pedagang sayur, pedagang Ikan, Pedagang buah, pedagang bakso dan sebagainya. Dimana selain itu masyarakat kecil yaitu para pedagang yang kekurangan modal merasa sulit untuk mendapatkan pinjaman dari Bank terutama bank konvensional, dengan adanya BMT Khasanah-LPPSLH ini para pedagang terbantu dalam permodalan untuk pengembangan usahanya.¹¹

Pada penelitian yang penyusun lakukan lebih memfokuskan pada peran lembaga keuangan mikro agribisnis yaitu LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga tahun 2013 dalam mengembangkan ekonomi pedesaan terhadap para petani dan usaha mikro kecil dan menengah, baik dalam aspek permodalan, komitmennya terhadap produk yang mendukung UMKM, pendampingan dan pembinaan serta penyelesaian LKM-A dalam pembiayaan kepada nasabah yang bermasalah. Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian yang sudah ada.

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara menyeluruh dalam memahami Proposal Skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Sistematika penulisan ini, penulis bagi lima bab setelah itu tambahan formalitas yang berisikan halaman judul, halaman nota pembimbing,

¹¹ Dwi Septi Rosita, "Peran BMT Khasanah-LPPSLH dalam Pengembangan Ekonomi Kerakyatan", Purwokerto : STAIN Purwokerto. 2009.

halaman pengesahan, halaman motto, halaman kata pengantar, daftar isi, dan lampiran-lampiran lainnya jika dibutuhkan.

BAB I, Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, serta sistematika penelitian.

BAB II, Penulis akan mengungkapkan tinjauan umum LKM-A PUAP dalam Pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang terdiri dari: pengertian lembaga keuangan mikro, pola-pola keuangan mikro di Indonesia, Prinsip keuangan dalam Islam, Prinsip akad dalam *muamalah*, kaitan lembaga keuangan mikro dan kemiskinan, hakekat pemberdayaan ekonomi kerakyatan, Landasan Pembangunan ekonomi kerakyatan, Pokok-pokok pikiran ekonomi kerakyatan, strategi ekonomi kerakyatan, bentuk-bentuk dan model pembangunan ekonomi rakyat, Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A PUAP) dan Peran LKM-A PUAP dalam Ekonomi Pedesaan.

BAB III, Metodologi Penelitian: penulis paparkan berbagai analisis yang meliputi analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LKM-A PUAP dalam pembangunan ekonomi pedesaan (Analisis SWOT), Matrik SWOT serta tahap pengambilan keputusan dari LKM-A PUAP.

BAB IV, Hasil Penelitian dan peranan LKM-A PUAP dalam pembangunan ekonomi rakyat: Profil LKM-A PUAP Purbalingga yang terdiri dari sejarah singkat, visi misi dan struktur organisasi, produk dan model pembiayaan kepada Petani/UKM, Hasil analisis SWOT,

pendampingan dan pembinaan usaha, penyelesaian pembiayaan bermasalah.

BAB V, Penutup. Dalam bagian penutup berisi kesimpulan dari pembahasan analisis, serta saran sebagai akhir dari isi pembahasan.

Kemudian pada akhir, penulis cantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini beserta lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.

BAB II

LANDASA TEORI

A. Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A PUAP)

1. Pengertian

LKM-A PUAP adalah lembaga keuangan mikro yang khusus melayani para petani dalam mendukung program pengembangan usaha agribisnis perdesaan. Lembaga Keuangan ini didirikan untuk melaksanakan fasilitas bantuan permodalan GAPOKTAN Penerima PUAP di sejumlah daerah di pedesaan.

LKM-A PUAP diharapkan mampu melakukan fasilitasi "intermediasi" usaha Kelompok Tani (POKTAN) dan Petani anggotanya dalam hal utamanya "permodalan", dan bukan menyaingi usaha anggota, sehingga arah kegiatannya lebih kepada fungsi jasa keuangan/ Lembaga Keuangan Mikro (Unit Keuangan Mikro/LKM) yang profesional, mandiri dan mengakar di masyarakat.¹²

2. Dasar Hukum

LKM-A PUAP merupakan salah satu Lembaga Keuangan Agribisnis yang menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan hadits dalam kegiatan perbankannya. Disamping

¹² Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) dan SO MANAGERIAL LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

al-Qur'an dan hadits dalam menjalankan kegiatannya, LKM-A PUAP juga berpedoman pada PERMENTAN Nomor: 29/Pementan/OT.140/3/2010.

Perijinan LKM-A PUAP diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A TAHUN 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro.

3. LKM-A PUAP Dan Kondisi

LKM-A PUAP adalah Unit Pengelola Keuangan Mikro Gapoktan, yaitu sebuah Lembaga Keuangan Mikro unit usaha Gapoktan yang fungsi utamanya adalah mendorong kegiatan menabung dan fasilitasi pembiayaan/permodalan usaha kelompok tani/petani anggotanya. LKM-A PUAP harus memiliki Prinsip Kesewadayaan, Kemandirian dan kehati-hatian.

Prinsip kesewadayaan modal LKM-A PUAP haruslah bersumber dari anggotanya sendiri, berupa : Simpanan Pokok Khusus, semacam "saham" yang dihimpun dari para pendiri perwakilan kelompok tani dan perorangan petani/masyarakat setempat. Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dan. Selain itu LKM-A PUAP dapat membuka berbagai jenis tabungan (Simpanan Sukarela)

Prinsip Kemandirian, dalam perkembangannya LKM-A PUAP harus mampu membiayai kegiatan usahanya sendiri dan bahkan menguntungkan sehingga dapat memberikan SHU kepada anggota. Layanan tabungan hanya dibolehkan dari anggota (telah memiliki simpanan pokok), sedang layanan Pembiayaan/pinjaman harus memprioritaskan kepada anggota.

Prinsip Kehatihan, Setiap pemberian pembiayaan harus melalui analisis pembiayaan dan/atau kelayakan usaha, persetujuan bersama Komite Pembiayaan, dan adanya Jaminan barang (boleh diterapkan), namun pertimbangan yang terbaik tetap atas watak/karakter peminjam sendiri.

B. Model LKM-A PUAP di Indonesia

Model Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang berkembang di Indonesia menggunakan model Konvensional, Syari'ah dan modifikasi pola Grameen Bank, ketiganya menggunakan pola operasional yang beragam sesuai dengan kondisi dan budaya setempat (Local Wisdom).

Model konvensional dicirikan dengan bunga/jasa pinjaman. Bunga yang menurut definisi kapitalis merupakan harga dari uang yang dipinjamkan/dikreditkan. Setiap uang yang ditanamkan oleh pemodal (investor) harus berkembang dan menguntungkan. Keuntungan mengambil dari selisih bunga antara bunga tabungan dengan bunga pinjaman. Jadi

pemodal mendapatkan keuntungan dari bunga tanpa keterlibatan langsung dalam usaha.

Sedangkan model syariah yang membedakannya adalah bagi hasil. Bagi hasil merupakan prinsip kerjasama bisnis antara dua pihak; pemilik modal (*shahibul maal*) dan penerima modal (*mudharib*), bersepakat untuk membiayai dan melakukan suatu usaha. Pembagian hasil dari keuntungan usaha yang diperoleh *mudharib* sesuai dengan akad awal. Maka tidak heran kalau masyarakat mengidentifikasi pembiayaan model syariah sebagai pembiayaan bagi hasil.

Salah satu ciri unik Grameen Bank (GB) adalah pola pemberian kreditnya yang disandarkan pada Membangun Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis pembentukan kelompok kecil penerima kredit. Kriteria pemberian modal yang dianut GB kepada masyarakat miskin pedesaan adalah tanpa agunan/penjaminan (*collateral*) dan bukan kontrak legal, yang biasa dilakukan pada sistem dan prinsip bank konvensional. Kredit diberikan kepada orang miskin dan tidak berpenghasilan tetap namun mereka punya aktivitas yang mendatangkan penghasilan (*Income Generating*). Dukungan anggota kelompok dalam proses peminjaman kredit menjadi pengganti perlunya agunan di GB. Dukungan pendampingan berupa pengawasan dan bimbingan yang ketat dari pihak bank membantu menurunkan risiko kredit macet. Model lembaga keuangan Konvensional, Syariah, dan GB bertujuan untuk meningkatkan usaha dan perkembangan perekonomian di pedesaan.

Ketiga model tersebut tentunya akan diterapkan pada kondisi masyarakat yang sesuai/cocok dengan karakteristik sasaran.¹³

C. Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

1. Pengertian

Belakangan ini istilah pemberdayaan ekonomi rakyat atau usaha kecil menengah menjadi topik pembicaraan banyak kalangan. Penggunaan istilah ekonomi rakyat memberikan kesan secara umum yang menggambarkan bahwa seolah-olah selama ini telah terjadi pembelahan (dikotomi) antara rakyat dan konglomerat. Melihat kecenderungan yang demikian, maka untuk memahami substansi yang sesungguhnya dari istilah tersebut diperlukan pengkajian secara memadai sehingga kesan yang bernada dikotomis rakyat versus konglomerat dapat dipahami secara baik pula.

Kata “pemberdayaan dan memberdayakan” yang merupakan terjemahan dari kata “empower” kemunculan kata ini memberikan isyarat bahwa selama ini telah terjadi ketidakberdayaan dalam kehidupan kelompok tertentu baik dalam siklus kehidupan politik, sosial maupun ekonomi. Menurut *Merriam Webster* dan *Oxford English Dictionary*, kata *empower* mengandung dua pengertian, yaitu: (1) *to give power* atau *authority to* atau memberi kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau

¹³ Wahyu purnomo, “Konsep Dasar & Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan,” <http://puap.deptan.go.id/>, diakses 14 Nofember 2013 pukul 06.27

mendelegasikan otoritas ke pihak lain; (2) *to give ability to* atau *enable* atau usaha untuk memberi kemampuan atau keperdayaan.¹⁴

pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Pemberdayaan dapat dilihat dari tiga sisi; Pertama, pemberdayaan dengan menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi rakyat berkembang. Kedua, pemberdayaan dilakukan untuk memperkuat potensi ekonomi atau daya yang dimiliki keluarga. Upaya yang dilakukan adalah meningkatkan taraf hidup pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti ; modal, teknologi, informasi, dan lapangan kerja. Ketiga, pemberdayaan melalui pengembangan ekonomi rakyat berarti berupaya melindungi mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta menciptakan kebersamaan dan kemitraan antara yang maju dan yang belum maju.¹⁵

Ekonomi rakyat sendiri, secara definitif dapat dikatakan sebagai ekonomi yang merujuk pada pelaku ekonomi mayoritas rakyat kecil (petani kecil, buruh tani, pedagang kecil, pengrajin kecil dan sebagainya) atau ekonomi rakyat adalah sebagai sistem partisipatif yang memberikan

¹⁴ Effendi M. Guntur, *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat transformasi Perekonomian Rakyat Menuju Kemandirian dan Berkeadilan* (Jakarta: CV Sagung Seto, 2009), hlm. 3.

¹⁵ Muhammad, *Bank Syariah problem dan prospek perkembangan di indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005). hlm. 112

akses yang fair dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat di dalam proses produksi, distribusi dan konsumsi nasional tanpa harus mengorbankan fungsi sumber daya alam dan lingkungan sebagai sistem pendukung kehidupan masyarakat secara berkelanjutan.¹⁶ Istilah lain yang senada dengan itu adalah ekonomi kerakyatan.

Keduanya sering digunakan secara bergantian meskipun pada kenyataannya memiliki makna yang berbeda. Dalam hal ini memberikan klasifikasi terhadap dua istilah tersebut. Yaitu mengatakan bahwa ekonomi kerakyatan merujuk pada sistem atau aturan main dalam kegiatan ekonomi yang demokratis, yang berpihak dan memberi kesempatan luas bagi pelaku ekonomi rakyat untuk berkembang dan berperan dalam perekonomian nasional.

Menerapkan ekonomi kerakyatan berarti mendesain sistem (aturan main) berekonomi yang memihak ekonomi rakyat serta menetapkan koperasi serta usaha-usaha kopratif sebagai semangat yang menjiwai perilaku ekonomi perorangan dan masyarakat.¹⁷ Atau dapat dikatakan ekonomi rakyat pada dasarnya merupakan kegiatan yang bertumpu pada sektor riil, yang mampu menyerap potensi dan sumber daya yang ada dan tersedia di masyarakat setempat secara swadaya, dan hasilnya ditunjukkan untuk kemakmuran seluruh anggota masyarakat, bukan untuk orang seorang atau kelompok tertentu.

¹⁶ Suharto Prawirakusumo, *Ekonomi Rakyat, Konsep Kebijakan dan Strategi*, (Yogyakarta: UGM), hlm. 197.

¹⁷ Muhammad, *Bank Syariah 'ah problem dan prospek perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm. 114-115

2. Landasan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Secara normatif, moral filosofis sistem ekonomi kerakyatan sebenarnya sudah tercantum dalam UUD 1945, khususnya pasal 33, yang jika disederhanakan bermakna bahwa perekonomian bangsa disusun berdasarkan demokrasi ekonomi dimana kemakmuran rakyat banyaklah yang lebih diutamakan dibanding kemakmuran orang perorangan. Bumi air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok atau sumber-sumber kemakmuran rakyat.¹⁸

Sebagaimana dilengkapi oleh Pasal 27 ayat 2 dan Pasal 34, peran negara dalam sistem ekonomi kerakyatan antara lain meliputi lima hal sebagai berikut: (1) mengembangkan koperasi (2) Mengembangkan BUMN; (3) memastikan pemanfaatan bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung didalamnya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (4) memenuhi hak setiap warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak; (5) memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

3. Manajemen Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Pada pelaksanaannya pembangunan ekonomi rakyat membutuhkan suatu konsep kebijaksanaan yang secara nasional dapat disepakati bersama dan yang secara oprasional dapat di jadikan acuan bagi pelaksanaanya.

¹⁸ Rachmat Hendayana, "*Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis*," <http://puap.deptan.go.id/>, diakses tanggal 29 Sep 2013 pukul 08.27.

Refleksi pembangunan nasional yang berkerakyatan dapat bercermin dari *tripel track development*, yaitu :¹⁹

1. *Pro-poor development*: Investasi Proyek pembangunan harus menyelesaikan kemiskinan supaya pendapatan masyarakat bisa meningkat.
2. *Pro-job development*: Lapangan pekerjaan harus dirangsang oleh pemerintah agar produktifitas msyarakat bertambah. Evek samping dari penciptaan kesempatan kerja ialah penekanan kriminalitas.
3. *Pro-growth development*: Pembangunan mesti diisi dengan pertumbuhan ekonomi yang setara dengan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) dalam mengelola SDA (Sumber Daya Alam).

Triple-track development dapat dijabarkan lebih lanjut menjadi empat Strategi Dasar Pembangunan Ekonomi Kerakyatan, yaitu:

- a) *Social safety net strategy*: Pengaturan kembali tata cara kepemilikan dan pemanfaatan lahan; Pemanfaatan teknologi tepat guna dalam lapangan pekerjaan yang padat karya seperti dalam agrobisnis; Penggalakan tabungan dalam negeri; Penyaluran kredit Usaha Tani, Kredit UMKMK (Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi); Realokasi jatah dan pagu kredit dengan keberpihakan terhadap sektor riil secara kentara berarti; Pembangunan model Desa Terpadu; Pembangunan Industri Kecil dan Menengah yang lumayan tahan

¹⁹ Soeharsono Sangir, *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 4.

goncangan krisis; Pendukungan perekonomian rakyat oleh pemerintah seiring era otonomi daerah.

- b) *Employment Strategy*: Penitikberatan alokasi semua macam investasi publik dan privat ke pelunasan kesempatan kerja produktif; Penambahan lapangan pekerjaan untuk meningkatkan penghasilan dan mengentaskan kemiskinan; Pengerakan dana masyarakat ke kegiatan pemberdayaan ekonomi daerah untuk menyelesaikan prahara urbanisasi maupun ketimpangankesejahteraan antara pusat dan daerah.
- c) *Basic-need strategy*: Penciptaan angkatan kerja yang kreatif dan inovatif; Perbaikan malnutrisi masyarakat; Subsidi silang untuk wajib belajar sembilan tahun; Penggalangan Gerakan Nasional Orang Tua Asuh; Pembangunan pedesaan secara multidimensi.
- d) *Agriculture reform*: Revitalisasi pertanian sebagai ragam pembangunan sektor yang perlu diwariskan antargenerasi. Indonesia bisa berkaca pada pengalaman nyata reformasi agrikultur Korea Selatan. Produktivitas Korea dapat bangkit setelah pemerintah dan rakyat Korea bahu-membahu mengembangkan bidang pertanian. Pemerintah Korea benar-benar menunjukkan keberpihakannya terhadap rakyat dengan jalan melakukan investasi pertanian dalam jumlah yang besar. Pemerintah Korea berhasil membangun pertanian sebab menjalankan strategi pembenahan mutu IPTEKS (Ilmu, Pengetahuan, Teknologi dan Seni) yang dimiliki SDM Pertanian.

Pada tahap awal pemerintah berperan sebagai inisiator tunggal. Pada tahap selanjutnya, pemerintah menarik diri setahap demi setahap sampai akhirnya berperan jadi fasilitator saja, hubungan kemitraan serasi antara petani individual dengan *villagers Cooperative* sudah muncul.

Beberapa hal yang patut menjadi perhatian apabila sistem ekonomi saat ini akan diterapkan pada ekonomi kerakyatan:²⁰

- 1) Perhatikan karakteristik daerah serta latar belakang keahlian mayoritas masyarakat setempat.
- 2) Kembangkan ekonomi berbasis rakyat yaitu kegiatan ekonomi yang sesuai dengan keahlian mayoritas masyarakat setempat.
- 3) Pertahankan ciri khas atau karakteristik daerah, dengan meningkatkan nilai (*value*) dari potensi yang ada.
- 4) Meningkatkan peran Pemerintah daerah dengan mendorong tumbuhnya ekonomi rakyat melalui perbaikan infrastruktur dan fasilitas apa pun agar ekonomi rakyat tumbuh.
- 5) Mendorong tumbuhnya industri berbasis potensi lokal/UMKM dengan pemberdayaan/pembentukan koperasi produktif.

D. Pemberdayaa Ekonomi Rakyat Dengan Ekonomi Islam

Secara sederhana bisa dikatakan, bahwa sistem ekonomi Islam adalah suatu sistem ekonomi yang didasarkan pada ajaran dan nilai-nilai Islam.

²⁰ Socharsono Sangir, *Kapita Selektu Ekonomi Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 639.

Sumber dari keseluruhan nilai tersebut sudah tentu Al-Quran, As-Sunnah, *ijma'* dan *qiyas*. Nilai-nilai sistem ekonomi Islam ini merupakan bagian integral dari keseluruhan ajaran Islam yang komperhensif dan telah dinyatakan Allah Swt. sebagai ajaran yang sempurna.

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara garis besar dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Sumber daya dipandang sebagai amanah Allah kepada manusia, sehingga pemanfaatannya haruslah bisa dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Implikasinya adalah manusia harus menggunakannya dalam kegiatan yang bermanfaat bagi dirinya dan orang lain.
- b) Kepemilikan pribadi diakui dalam batas-batas tertentu yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat dan tidak mengakui pendapatan yang diperoleh secara tidak sah.
- c) Bekerja adalah kekuatan penggerak utama kegiatan ekonomi Islam.

Dalam Al-Quran dijelaskan sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا
 أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisaa’ : 29).

Islam mendorong manusia untuk bekerja dan berjuang untuk mendapatkan materi/harta dengan berbagai cara, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Hal ini dijamin oleh Allah bahwa Allah telah menetapkan rizki setiap makhluk yang diciptakan-Nya.

- d) Kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya dimiliki oleh segelintir orang-orang kaya, dan harus berperan sebagai kapital produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- e) Islam menjamin kepemilikan masyarakat dan penggunaannya dialokasikan untuk kepentingan orang banyak.

Prinsip ini didasari oleh sunnah Rasulullah yang menyatakan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama atas air, padang rumput, dan api.

- f) Seorang muslim harus tunduk kepada Allah dan hari pertanggungjawaban di akhirat.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 281:

وَأَتُّوْا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ۗ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا

كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٢٨١﴾

“Dan peliharalah dirimu dari (azab yang terjadi pada) hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. kemudian masing-masing diri diberi Balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).

Kondisi ini akan mendorong seorang muslim menjauhkan diri dari hal-hal yang berhubungan dengan maisir, gharar, dan berusaha dengan cara yang batil, melampaui batas, dan sebagainya.

- g) Zakat harus dibayarkan atas kekayaan yang telah memenuhi batas (nisab). Zakat ini merupakan alat distribusi sebagian kekayaan orang kaya yang ditujukan untuk orang miskin dan mereka yang membutuhkan. Menurut pendapat para ulama, zakat dikenakan 2,5% untuk semua kekayaan yang tidak produktif, termasuk di dalamnya adalah uang kas, deposito, emas, perak, dan permata, dan 10% dari pendapatan bersih investasi.
- h) Islam melarang riba dalam segala bentuknya. Hal tersebut telah jelas dituliskan dalam Al-Quran bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²¹

²¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam Pendekatan Ekonomi Makro Islam dan Konvensional*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005, hlm. 2-3.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus, dalam hal ini adalah LKM-A PUAP Kab. Purbalingga Tahun 2011.²²

Pendekatan ini dipilih karena dianggap mampu memberikan pemahaman yang mendalam dan rinci berkaitan dengan suatu peristiwa atau gejala sosial yang dalam hal ini mengenai Peran Lembaga Keuangan Mikro Agrobisnis (LKM-A) dalam pembangunan ekonomi pedesaan. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk mengetahui kondisi tentang permasalahan penelitian yang didasarkan pada pemahaman serta pembentukan pemahaman yang diikat oleh teori terkait dan penafsiran peneliti.²³ Data yang dihasilkan merupakan hasil pengamatan dari kegiatan penelitian terhadap LKM-A terkait. Data tambahan yang berkaitan dengan topik penelitian didapatkan melalui studi dokumen yang relevan dengan fokus penelitian yang digunakan sebagai data tambahan untuk memperkaya substansi penulisan skripsi. Data yang diperoleh secara kualitatif di lapangan dengan alat analisis yang digunakan yaitu SWOT sehingga diperoleh hasil yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan.

²² Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, cet. 5 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), hlm. 23.

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), Hlm. 5.

B. Subyek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan suatu yang kedudukannya sangat sentral, dimana pada subjek inilah data tentang variabel yang diteliti berada dan diamati oleh peneliti yaitu pihak praktisi Manager dan staff manager LKM-A PUAP selaku Pimpinan, yang berada di Kabupaten Purbalingga tahun 2010. Sebanyak 25 LKM-A yang tersebar di berbagai Desa dan Kecamatan di Purbalingga.²⁴ Dari sekian banyak LKM-A dipilih 4 sampel dengan cara *non probability sampling* dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* yaitu dipilih berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu.

Objek penelitian adalah Peran LKM-A PUAP Kabupaten Purbalingga tahun 2010 dalam pengembangan ekonomi rakyat.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

a. Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan di kantor LKM-A PUAP Kabupaten Purbalingga Tahun 2010. Yaitu kantor (LKM-A Subur Desa Kedungjati Kec. Bukateja, LKM-A Mugi Rahayu Desa Bandingan Kec. Kejobong, LKM-A Sumber Makmur Desa Gemuruh Kec. Padamara, LKM-A Rukun Tani Desa Brecek Kec. Kaligondang)

b. Waktu Penelitian

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet.5 (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2000), hlm.119.

Penelitian dilaksanakan mulai bulan Desember 2013 sampai bulan Januari tahun 2014.

D. Sumber Data

a. Data Primer (*Primary Data*)

Yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penyelidik dengan tujuan tertentu.²⁵ Dalam hal ini data yang diperoleh bersumber pada pengurus LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga tahun 2010 sebanyak 4 LKM-A, 3 orang narasumber ahli PMT (Pembantu Mitra Tani) dan 5 orang pelaku UMKM/petani. Mengenai peran dalam pembangunan ekonomi Pedesaan melalui berbagai aspek yang ada dengan menggunakan sumber data dan dokumen-dokumen LKM-A PUAP.

b. Data Sekunder (*Secondary Data*)

Yaitu data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan orang-orang diluar dari penelitian, walaupun itu sesungguhnya data asli, yaitu berkaitan dengan upaya LKM-A PUAP dalam mengembangkan ekonomi pedesaan,²⁶ diantaranya adalah: studi literatur, Pengkajian Pustaka, bunga rampai artikel Ekonomi dan dll.

E. Teknik Pengumpulan Data

²⁵ Winarno Surahmad, Pengantar Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik, Edisi 7 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

²⁶ Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta 1995), hlm. 13.

1) Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang akan diteliti.²⁷ Teknik ini penyusun gunakan untuk mengambil data dengan cara menangkap gejala yang diamati dengan menjadikan sebuah catatan atau deskriptif mengenai perilaku dalam kenyataan serta memahami perilaku tersebut baik secara langsung ataupun tidak langsung dengan menggunakan alat-alat yang telah dipersiapkan sebelumnya yang kemudian catatan tersebut dianalisis.²⁸

Di sini penulis mengadakan observasi langsung untuk mendapatkan data-data yang diinginkan dengan mendatangi langsung ke LKM-A PUAP. Metode ini digunakan untuk mengamati upaya-upaya LKM-A PUAP dalam pengembangan ekonomi pedesaan.

2) Wawancara (*Interview*)

Yaitu metode percakapan antara dua belah pihak dengan maksud tertentu.²⁹ Wawancara ini penyusun lakukan secara terstruktur dengan melalui tahap tahap muka (*face to face*) maupun dengan alat komunikasi dengan pihak LKM-A PUAP, yaitu dengan Meneger, Staff Meneger, dan pengurus LKM-A PUAP serta nasabah.

²⁷ Hari wijaya dan Triton, *Teknik Penulisan Skripsi & Tesis* (Yogyakarta: Oriza, 2007), hlm. 63.

²⁸ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* Edisi 1 (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 70.

²⁹ Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1998), hlm. 135.

3) Dokumentasi

Yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen seperti monogram atau catatan-catatan, transkrip buku, surat kabar, majalah dan agenda-agenda yang ada relevansinya dengan penelitian. Semua dokumen yang dimaksud adalah dokumen yang berkaitan dengan upaya-upaya LKM-A PUAP dalam pengembangan ekonomi rakyat.

F. Teknik Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kritis. Penelitian kualitatif adalah prosedur yang menghasilkan data-data deskriptif yang memaparkan tentang peran LKM-A PUAP dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan kedalam dua metode, yaitu: Deskriptif analisis, dan Analisis SWOT.

1. Metode deskriptif analisis

Analisis yang bertujuan untuk memberikan deskriptif mengenai subjek penelitian berdasarkan variabel yang diperoleh dari subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis.³⁰ Dalam deskriptif analisis, peneliti ini akan memaparkan segala upaya tindakan dari LKM-A PUAP terhadap pembangunan ekonomi desa. Dalam tahap deskriptif akan memaparkan gambaran LKM-A PUAP

³⁰ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, cet VI (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm 126

secara umum pembinaan dan pendampingan usaha, penyelesaian pembiayaan bermasalah dan penjelasan lainnya yang mendukung data dalam penelitian ini.

2. Metode analisis SWOT

Yaitu metode analisis data yang menunjukkan bahwa kinerja kebijakan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor eksternal dan internal yakni faktor kekuatan (*strengths*), kelemahan (*Weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).³¹

Matrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi LKM-A PUAP dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan internal yang dimilikinya. Analisis Matrik SWOT berfungsi untuk memperoleh berbagai alternatif strategi yang dapat dipilih oleh LKM-A PUAP dalam mengembangkan usahanya.³²

Dengan menganalisa faktor peluang dan ancaman eksternal dan disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan, maka akan menghasilkan empat kemungkinan alternatif. Adapun alternatif empat kemungkinan tersebut antarlain:

- 1) *SO Strategies* : dimana kekuatan internal sistem digunakan untuk meraih peluang-peluang yang ada di luar sistem

³¹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik* (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 172.

³² Fredy Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard: teknik Menyusun Strategi Koporat yang Efektif plus Cara Mengelola Kinerja Dan Resiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2001), hlm.202-203.

- 2) *WO Strategies* : bertujuan untuk memperkecil kelemahan internal sistem dengan memanfaatkan peluang-peluang eksternal
- 3) *ST Strategies* : dimana sistem berusaha agar mampu menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman-ancaman eksternal
- 4) *WT Strategies* : merupakan taktik untuk bertahan yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan-kelemahan internal dan menghindari dari ancaman-ancaman lingkungan.

Berikut ini adalah gambaran matrik SWOT.

Internal Eksternal	STRENGTHS (S) Tentukan faktor-faktor Kekuatan internal	WEAKNESS (W) Tentukan Faktor-faktor kekuatan internal
OPPORTUNITIES (O) Tentukan faktor-faktor kekuatan eksternal	STRATEGI SO Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang	STRATEGI WO Ciptakan strategi yang menggunakan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
THREATS (T) Tentukan faktor-faktor eksternal.	STRATEGI ST Ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi <i>ancaman</i> .	STRATEGI WT Ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan <i>menghindari ancaman</i> .

Tabel 1 Rencana Strategi Berdasarkan SWOT

Adapun tahapan analisis SWOT sebagai formulasi/perumusan Strategi LKM-A PUAP terhadap Pembangunan Ekonomi Pedesaan di Kabupaten Purbalingga terdiri dari tiga tahapan yaitu:

- 1) Tahap evaluasi data internal dan eksternal

- 2) Tahap pembuatan matrik SWOT
- 3) Tahap pengambilan keputusan.³³

³³ *Ibid*, hlm 203.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

1. Gambaran Umum LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga

Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah program Departemen Pertanian RI yang dalam pelaksanaannya menggunakan pendekatan, antara lain : Sebagian besar penduduk Indonesia adalah bekerja di sektor pertanian dan tinggal di perdesaan, mayoritas usaha petani (97%) adalah tergolong usaha mikro. Di antara problematika utama usaha tani di Indonesia adalah masalah permodalan, yang penyebabnya antara lain : Usaha tani umumnya adalah usaha mikro yang tidak mampu mendapatkan akses modal dari perbankan. Bank nyaris tidak mau membiayai usaha di sektor pertanian karena pertimbangan resiko dan biaya mahal, kecuali melalui *linkage* dengan Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) yang mampu menjembatani perbankan dengan usaha tani/mikro. Masalahnya belum cukup banyak LKM-A yang dimiliki sendiri oleh petani/kelompok tani sehingga dapat memberdayakan anggotanya untuk melakukan fungsi *linkage* tersebut.³⁴

³⁴ Pedoman Umum PUAP Tahun 2008 – 2011.

LKM-A PUAP merupakan salah satu Lembaga Keuangan Agribisnis yang menggunakan sistem operasional berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan hadits dalam kegiatan perbankannya. Disamping al-Qur'an dan hadits dalam menjalankan kegiatannya, LKM-A PUAP juga berpedoman pada PERMENTAN Nomor: 29/Pementan/OT.140/3/2010.

Perijinan LKM-A PUAP diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Gubernur Bank Indonesia tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Nomor: 351.1/KMK.010/2009, Nomor: 900-639A TAHUN 2009, Nomor: 01/SKB/M.KUKM/IX/2009, Nomor: 11/43A/KEP.GBI/2009 tentang Strategi Pengembangan Keuangan Mikro.³⁵

Pada tahun 2010 Kabupaten Purbalingga telah menyalurkan dana BLM PUAP kepada 25 desa/Gapoktan dari Kementrian Pertanian, sehingga total desa/Gapoktan yang menerima dana BLM PUAP adalah sebesar Rp. 2.500.000.000,- (Milyar); Total desa/Gapoktan yang telah menerima dana BLM PUAP dari Tahun 2008 s.d Tahun 2011 adalah sebanyak 156 desa/Gapoktan.³⁶

³⁵ Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO MANAGERIAL LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

³⁶ Dokumen data Pengendalian dan Pendampingan Aset GAPOKTAN di Kabupaten Purbalingga 2011.

TAHUN	JUMLAH DESA/GAPOKTAN
2008	35
2009	48
2010	25
2011	48
JUMLAH	156

Tabel 2 Penyaluran PUAP di Kabupaten Purbalingga

Alokasi penggunaan dana Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) diatur dengan Ketentuan Umum yaitu sebesar 100 % digunakan untuk usaha jasa keuangan/simpan pinjam sebagai usaha inti LKM-A untuk memfasilitasi permodalan usaha Rumah Tangga Miskin dan/atau Usaha Mikro yang pergulirannya harus memenuhi Ketentuan Umum yaitu: Modal LKM-A GAPOKTAN terdiri dari Simpanan Pokok, Simpanan Pokok Khusus Pendiri, Bantuan Hibah Bersyarat, dan Simpanan Wajib, jumlah modal minimal 20% dari total aset.

PUAP berorientasi lebih dari sekedar proyek, melainkan program yang membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat pertanian dan perdesaan secara berkelanjutan dengan memadukan antara partisipasi dan keswadayaan masyarakat dengan dukungan stimulan pemerintah.

Menumbuhkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang mampu melakukan fasilitasi *intermediasi* usaha Kelompok Tani (POKTAN) dan Petani anggotanya dalam hal utamanya permodalan, dan bukan menyaingi usaha anggota, sehingga arah kegiatannya lebih kepada fungsi jasa keuangan/ Lembaga Keuangan Mikro (Unit Keuangan Mikro/LKM) yang profesional, mandiri dan mengakar di masyarakat.

Menerapkan sistem manajemen lembaga keuangan berskala koperasi, dengan teknis administrasi dan prosedur yang sederhana yang didukung teknologi informasi *canggih*.³⁷ Dan adapun manfaat yang diberikan setelah berdirinya LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga adalah :

- a. Mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan;
- b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, Penyuluh, dan Penyelia Mitra tani;
- c. Memberdayakan kelembagaan petani dan Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi ke-Lembagaan Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

2. Visi Misi LKM-A PUAP

Visi

³⁷ Wahyu purnomo, "Konsep Dasar & Organisasi Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) Gapoktan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan", <http://puap.deptan.go.id/>, diakses 14 Nof 2013 pukul 06.27.

Menjadi lembaga keuangan yang bersifat mandiri, sehat dan profesional, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya.³⁸

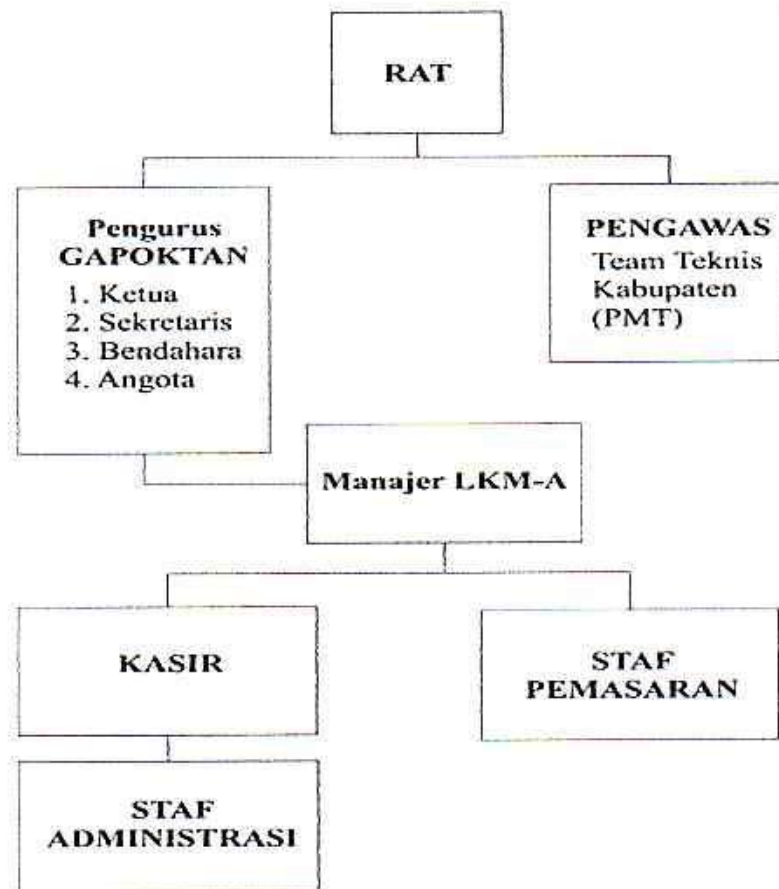
Misi

LKM-A PUAP mempunyai misi:

- 1) Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
- 2) Gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan organisasi.
- 3) Menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan yang diridhoi Sang Pencipta.
- 4) Untuk biaya hidup dimasa depan dengan menabung sekaligus membantu umat kita yang kurang mampu dalam usaha yang produktif

3. Struktur Organisasi LKM-A PUAP

³⁸ Dokumen Profile Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) PUAP Pedesaan 2008-2011.



Tabel 3 Struktur Organisasi LKM-A PUAP

4. Job Description (Uraian Tugas)

Mengacu pada struktur organisasi LKM-A PUAP Gapoktan di atas, maka pada masing-masing tingkatan diberikan uraian tugas sebagai fungsi masing-masing tingkatan dengan ciri sebagai sebuah organisasi :

a. Pengurus GAPOKTAN

Pengurus terdiri dari 3-5 orang , dengan struktur satu orang ketua, satu sekretaris, satu bendahara dan sisanya anggota.

Kualifikasinya adalah orang yang mempunyai pengetahuan dan mengerti tentang seluk beluk pengelolaan LKM-A PUAP. Pengurus adalah wakil dari RAT yang dipilih dan diangkat oleh RAT .

b. Pengawas

Pengawas adalah orang yang diangkat oleh RAT dengan tugas utama untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat baik diminta atau tidak kepada pengurus. Maka untuk orang yang duduk di pengawas ini adalah orang yang mempunyai sifat amanah, serta mempunyai pengetahuan dan keterampilan tentang pengelolaan LKM-A PUAP terutama berhubungan dengan aspek akuntansi/ Audit, serta praktek muamalah.

Peran pengawas ini dijalankan oleh PMT (Penyelia Mitra Tani) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervisi dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP.

c. Manajer

Untuk menempati posisi dalam struktur tersebut, diperlukan personil yang berkualifikasi memadai atau memiliki kompetensi yang sesuai baik dari aspek pengetahuan, keterampilan di bidang Perbankan/simpan pinjam, adapun tugas-tugas manajer:

- 1) Bertanggung jawab atas perencanaan, koordinasi dan pengarahan dari semua aktivitas operasi LKM PUAP guna mencapai sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan.
- 2) Bertanggung jawab menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan produk, pemasaran dan penerapan dari sistem manajemen, administrasi kepegawaian, keuangan dan akuntabilitas keuangan pada pengurus.
- 3) Bertanggung jawab untuk operasi yang menguntungkan dalam rangka kebijaksanaan, sasaran-sasaran dan anggaran-anggaran yang dibuat bersama staff manajemen.

d. Staf Administrasi

Kewenangan : Menangani Administrasi dan keuangan, menyusun dan melaporkan laporan keuangan.

Tugas-tugas : Mengerjakan Jurnal Buku Besar, Menyusun Neraca dan Rugi Laba secara priodik, Melakukan pengalokasian pendayagunaan dana, Membantu manajer dalam hal pembuatan dan perumusan Arus Kas dan Budgeting.

e. Staf Pemasaran (Marketing)

1) Marketing Pembiayaan (*financing*)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar pembiayaan yang diberikan tidak macet

Tugas-tugas : Menyusun rencana pembiayaan, Melakukan analisa pembiayaan, Mengajukan pembiayaan kepada komite, Melakukan administrasi pembiayaan, Melakukan pembinaan nasabah/anggota, Membuat laporan perkembangan pembiayaan.

2) Marketing Penggalangan Dana (*funding*)

Kewenangan : Melakukan kegiatan pengerahan tabungan anggota/masyarakat sebagai pembangkit modal LKMS.

Tugas-tugas : Menyusun rencana pengerahan tabungan, Merencanakan produk-produk tabungan, Melakukan analisa data tabungan, Melakukan pembinaan nasabah/anggota, Membuat laporan perkembangan tabungan.

f. Kasir

Kewenangan : Bertugas sebagai penerima dan juru bayar.

Tugas-tugas : Menerima/menghitung uang dan membuat bukti penerimaan, Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah manajer, Melayani dan membayar pengambilan tabungan, Membuat buku kas harian, Setiap akhir jam kerja menghitung uang yang ada dan meminta pemeriksaan dari manajer.

Catatan : Banyak dari LKM-A PUAP yang pada saat awal pendirian pengelolanya terdiri dari tiga orang, maka sangat disarankan sebagai berikut : Manajer umum dapat dirangkap dengan Pembiayaan, Fungsi kasir dapat dipegang oleh

Pemasaran, Fungsi pembukuan tidak boleh melaksanakan fungsi kasir.³⁹

5. Produk LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

a. Produk *Funding*

LKM PUAP menawarkan berbagai macam produk tabungan dan deposito sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tabungan merupakan simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Sedangkan deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah penyimpan dengan LKM-A. Berikut adalah produk-produk LKM-A PUAP.⁴⁰

1) Simpanan Pokok Khusus/ Modal Penyertaan

Merupakan simpanan dana pihak ketiga yang hanya dapat ditarik berdasarkan jangka waktu 1, 3, 6 atau 12 bulan dan dapat diperpanjang otomatis (Automatic Roll Over). Setoran awal minimal Rp. 500.000. nasabah akan memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulannya dan dapat dijadikan jaminan pembiayaan.

2) Simpanan Masyarakat

³⁹ Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO Managerial LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

⁴⁰ Dokumen data realisasi pembiayaan LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga 20011-2012.

Merupakan simpanan yang dapat ditarik sewaktu-waktu dan nasabah akan memperoleh bonus yang menarik setiap bulannya. Tabungan ini dapat dipakai sebagai jaminan pembiayaan dan setoran awal minimal Rp 20.000.

3) Simpanan Pendidikan

Simpanan Pendidikan Merupakan Simpanan khusus pelajar dan mahasiswa dengan setoran awal minimal Rp. 20.000 dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

4) Simpanan Pertanian

Simpanan Pertanian Merupakan Simpanan khusus Petani dengan setoran awal minimal Rp. 20.000 dan akan memperoleh bagi hasil yang kompetitif setiap bulannya.

5) Simpanan Kurban

Simpanan Kurban merupakan simpanan yang dikhususkan untuk perencanaan kurban. Dengan setoran awal minimal Rp. 20.000 dan setoran selanjutnya disepakati bank dan nasabah. InsyaAllah niat berkorban di hari raya Idhul Adha akan dapat terlaksana. Nasabah juga akan mendapatkan bagi hasil yang menarik tiap bulannya.

Syarat dan ketentuan pembukaan rekening :

- a) Menyerahkan fotocoopy identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/identitas lainnya).

- b) Mengisi dan menandatangani aplikasi permohonan pembukaan rekening baru.

b. Produk *Financing*

1) Pembiayaan Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja yang menggunakan akad *musyarakah*, yaitu akad kerjasama antara LKM-A dan nasabah/petani dengan menggabungkan modal yang hasilnya akan dibagi sesuai nisbah yang disepakati. Apabila mengalami kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal. Besarnya keuntungan yang akan dibagikan harus dinyatakan dalam prosentase. Semua pihak juga dapat ikut serta dalam pengambilan keputusan managerial.

Manfaat : Membantu nasabah dalam pengembangan usaha dengan bagi hasil yang adil dan transparan.

Produk Pembiayaan Modal Kerja dengan Akad *Musyarakah* sangat diminati baik dari LKM-A dan Petani/UKM, bentuk kerjasama ini dinilai sesuai dengan Ekonomi pedesaan.

2) Pembiayaan Jual Beli Barang

Pembiayaan ini menggunakan akad *murabahah*, yaitu jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara nasabah dan LKM-A.

LKM-A bertindak sebagai pihak ketiga yang memesan barang kepada supplier kemudian menjualnya kembali kepada nasabah (pemesan) dengan harga perolehan ditambah margin (keuntungan) yang disepakati LKM-A dan nasabah.

Manfaat : Nasabah akan memiliki barang yang diinginkan melalui pembiayaan dari bank.

Dari segi pembiayaan produk *Murobahah* merupakan produk yang paling sering digunakan dalam pengadaan Peralatan Pertanian dan jual-beli Pupuk dan Obat-obatan pertanian.

3) Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan ini, menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*. Merupakan penyediaan dana atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara LKM-A dengan nasabah yang mewajibkan nasabah melunasi hutangnya sesuai akad.

Manfaat : Sebagai sumber dana bagi nasabah untuk biaya pendidikan, kesehatan dan jasa lainnya yang dibenarkan secara syariah.

Jenis produk ini kurang berkembang karena kurang dipahami masyarakat dan pelayanan kantor yang tidak setiap hari buka,⁴¹

Adapun persyaratan dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

a) Menjadi Anggota LKM-A PUAP

⁴¹ Dokumen data realisasi pembiayaan LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga 20011-2012.

- b) Mengisi Formulir Pemohonan Pembiayaan
- c) Mengisi syara persetujuan Suami Istri
- d) Menggunakan Jaminan
- e) Foto copy KTP suami istri yang masih berlaku
- f) Foto Copy KK
- g) Persaratan dimasukan ke dalam setopmap
- h) Akan disurvey kegiatan Usahanya

Penyaluran dana kepada masyarakat, LKM-A PUAP sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang teguh pada nilai-nilai syariah. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, LKM-A PUAP dalam menganalisa pembiayaan yang akan di tangani memiliki kriteria tertentu sebagai tanggung jawab penuh. Adapun yang perlu diperhatikan dalam menganalisa suatu pengajuan pembiayaan denagan prinsip 5C: ⁴²

a. *Character*

Character yaitu karajter atau kepribadian calon anggota. Dalam hal ini perlu diperhatikan dan diteliti tentang kebiasaan, sifat pribadi, gaya hidup, keadaan keluarga dan hubungan calon debitur dengan masyarakat. Karena hal ini dipandang perlu untuk mengetahui ukuran tentang kecakapan calon debitur dalam mengelola usahanya dan kemauannya dalam membayar.

b. *Campacity*

⁴² Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO Managerial LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

Capacity yaitu kemampuan calon debitur untuk mengelola usahanya. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah pengalamannya dalam hal usaha tertentu dan bagaimana keadaan usahanya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan calon debitur.

c. *Capital*

Capital yaitu pemodalannya yang dimiliki calon debitur. Hal ini meliputi kekayaan yang dimiliki untuk menjalankan dan memelihara usahanya, sumber-sumber modal dan penggunaannya.

d. *Collateral*

Collateral (agunan) yaitu suatu cara dalam mencari data untuk memastikan nilai kredit. Fungsi agunan/jaminan sebagai ikatan kepercayaan dalam pemberian kredit, sekaligus untuk memperkecil resiko dari pemberian kredit. Jaminan merupakan hal yang paling akhir apabila pertimbangan-pertimbangan lain belum meyakinkan, maka jaminan bisa dimasukkan sebagai pertimbangan akhir.

e. *Conditions*

Conditions yaitu kondisi perekonomian yang ada. Hal ini mencakup kondisi secara umum, kondisi pada sektor usaha calon debitur serta prospek dari usaha tersebut.

6. Pembinaan dan Pendampingan Usaha

Sesuai dengan tujuan utama LKM-A PUAP permasalahan keterbatasan modal bagi petani/UMKM di sekitar LKM-A sedikit demi sedikit tepecahkan, masarakat tidak terjerat lagi dengan rentenir yang menawarkan pinjaman dengan bunga yang tinggi, petani dan UMKM lebih fokus dengan usaha-usaha yang dijalannya.

Pada sisi pembiayaan, target pasar LKM-A PUAP lebih mengutamakan usaha yang produktif. LKM-A PUAP menajamkan fokus pembiayaan ke sektor usaha mikro kecil dan menengah. Keuletan melewati krisis menjadikan komitmen sungguh-sungguh dari pemerintah untuk mengembangkan UMKM yang kemudian ditindak lanjuti dengan inplementasi pembiayaan oleh lembaga keuangan seperti LKM-A PUAP.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh LKM-A PUAP akan diaplikasikan dalam bentuk produk pembiayaan. Di LKM-A PUAP Kabupaten Purbalingga produk tersebut berupa pembiayaan modal kerja (*Musyarokah*) Pembiayaan Jual-beli barang (*Murabahaah*) dan Pembiayaan Multi jasa (*ijarah* atau *kafala*)

Pendampingan yang dilakukan oleh pihak LKM-A PUAP yaitu menawarkan bagi para Petani dan UKM dengan penawaran produk yang persyaratannya ringan, dengan proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan dan tepat hingga jatuh tempo.

Pembiayaan yang dilakukan LKM-A PUAP sendiri selalu dengan pendampingan yang diberikan. Dengan katalain ketika melakukan pendampingan sekaligus pembinaan. Jadi pembinaan yang diberikan adalah bagi mereka yang telah memanfaatkan pembiayaan modal kerja dari LKM-A PUAP. Secara teknis pembinaan yang diberikan sebatas survei ke lapangan mengenai usaha si debitur dengan waktu yang tidak tertentu, tanpa diketahui nasabah. Adapun yang dilakukan disana adalah memberikan konsultasi-konsultasi mengenai usaha yang sedang digeluti si debitur, permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam usaha, dengan memberikan olusi-solusinya. Permasalahan yang dihadapi sebagian besar para pelaku usaha adalah mengenai manajemen keuangan, perencanaan, pencatatan maupun pelaporan, tercampurnya antara keuangan uasaha dengan keuangan keluarga, kurannya teknologi yang tepat guna, terbatasnya atau sulitnya bahan baku/bibit, akses terhadap informasi pasar kurang, serta infrastruktur yang kurang memadai. Hal tersebut semua dalam memecahkan masalah akan dibimbing secara bertahap oleh pihak LKM-A PUAP. Yang pada akhirnya diharapkan adanya sebuah pembinaan menuju kemandirian.⁴³

7. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

⁴³ Wawancara dengan Manager-manager LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga, tanggal 7-15 Desember 2013, pukul 11.00

Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan di mana terdapat suatu penyimpangan utama dan pembayaran kembali pembiayaan yang berkaitan terjadi kelambatan dalam pengembalian, atau diperlukan tindakan yang dalam pengembalian atau kemungkinan terjadi kerugian bagi LKM PUAP.

Pembiayaan bermasalah dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu⁴⁴:

a. Pembiayaan dengan gejala melemah

Kondisi ini dicirikan dengan keadaan perusahaan secara fisik sudah mulai melemah. Hal tersebut dapat dilihat pada laporan keuangannya (neraca dan laporan laba/rugi). Namun demikian dalam hal pembayaran kewajiban setiap bulannya, mitra masih tetap membayar.

b. Pembiayaan dengan pembayaran tidak teratur

Karena kondisi perusahaan mengalami masalah *cash flow*, maka mitra masih membayar hanya tidak pernah penuh sesuai dengan jumlah dan jadwal angsuran yang di janjikan.

c. Pembiayaan dengan kondisi diragukan

Mitra sudah tidak mampu membayar kewajiban angsurannya sehingga menimbulkan tunggakan.

d. Pembayaran tidak tertagih

Mitra sama sekali tidak membayar lagi kewajibannya dan sudah tidak dapat diharapkan lagi.

⁴⁴ Wawancara dengan Eko, Ibu Sari, team teknis PMT kabupaten Purbalingga, tanggal 8-10 November 2013, pukul 13.00

Cara penanganan/penyelesaian pembiayaan bermasalah dapat dilakukan dalam bentuk:

a. **Penyelamatan (*Rescue*)**

Terhadap nasabah-nasabah yang dipandang masih mempunyai prospek dan masih mempunyai itikad baik, maka pengelolaan dan penanganan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui tindakan penyelamatan. Penyelamatan pembiayaan dimaksud dapat ditempuh melalui cara:

- 1) Penagihan Intensif : Yaitu penyelamatan pembiayaan yang dilakukan melalui penagihan secara intensif kepada nasabah agar dapat memenuhi semua kewajibannya.
- 2) Penjadualan kembali (*Rescheduling*) : Yaitu penyelamatan pembiayaan yang hanya menyangkut perubahan jadwal pembayaran pokok dan/atau tunggakan pembayaran margin dan/atau jangka waktu pembiayaan.
- 3) Persyaratan kembali (*Reconditioning*) : Yaitu penyelamatan pembiayaan dengan cara merubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan yang tidak terbatas hanya pada perubahan jadwal pembiayaan, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum pembiayaan.

- 4) Penataan kembali (*Restructuring*); Adalah upaya yang dilakukan Bank untuk menata kembali (me-restrukturisasi) pembiayaannya agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya

b. Penyelesaian

Terhadap nasabah-nasabah pembiayaan bermasalah yang pengelolaannya dinilai tidak dapat dilakukan melalui salah satu bentuk penyelamatan (*rescue*) tersebut di atas, maka harus segera dilakukan langkah-langkah penyelesaian yang berupa tindakan-tindakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (baik ketentuan internal LKM-A PUAP maupun ketentuan Bank Indonesia atau perundang-undangan yang berlaku) agar dalam jangka waktu tertentu pembiayaan bermasalah tersebut dapat diselesaikan seluruhnya atau sebagiannya.⁴⁵

B. Analisis Peran LKM-A PUAP

LKM-A PUAP berorientasi lebih dari sekedar proyek, melainkan program yang membangun kemandirian dan keberdayaan masyarakat petani dan pedesaan secara berkelanjutan dengan memadukan antara partisipasi dan kesewadayaan masyarakat dengan dukungan stimulus pemerintah.

Menumbuhkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang mampu melakukan fasilitasi *intermediasi* usaha

⁴⁵ Dokumentasi Standar Operasional Prosedural (SOP) dan SO Managerial LKM-A PUAP tahun 2008-2011.

Kelompok Tani (POKTAN) dan Petani anggotanya dalam hal utamanya permodalan, dan bukan menyaingi usaha anggota, sehingga arah kegiatannya lebih kepada fungsi jasa keuangan/ Lembaga Keuangan Mikro (Unit Keuangan Mikro/LKM) yang profesional, mandiri dan mengakar di masyarakat. Dan adapun Peran LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga terlihat dari indikator *output, outcome, benefit dan impact*.

a. Indikator peran *output* antara lain

1. Tersalurkannya dana LKM-A PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian di kabupaten Purbalingga.
2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani di kabupaten Purbalingga.

b. Indikator Peran *outcome* antara lain

1. Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani di kabupaten Purbalingga.
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha.
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan kabupaten Purbalingga.

4. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah di kabupaten purbalingga.

c. Sedangkan Indikator peran *benefit* dan *Impact* antara lain:

1. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani di lokasi desa PUAP kabupaten Purbalingga.
2. Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani.
3. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan kabupaten Purbalingga.

C. Analisis SWOT LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan

Analisis SWOT merupakan salah satu metode untuk menggambarkan suatu kondisi dan mengevaluasi masalah atau setrategi bisnis yang didasarkan pada faktor internal berupa kekuatan dan faktot eksternal yang berupa peluang dan ancaman. Dalam metode tersebut hal-hal yang terkait dengan suatu masalah atau setrategi bisnis dapat didefinisikan atau dinilai, sehingga terpilihnya suatu strategi tertentu diyakini merupakan keputusan yang tepat. Analisis SWOT merupakan akronom dari *Strenght* (Kekuatan), *Weakness* (Kelemahan), *Opportunities* (Peluang), *Threas* (Ancaman).⁴⁶ Selanjutnya penulis akan menganalisis peran dari LKM-A PUAP di

⁴⁶ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi aksara, 1998), hlm. 172.

Kabupaten Purbalingga dalam pembangunan ekonomin pedesaan dilihat dari analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan.

1. Analisis Terhadap Kekuatan LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi Prdesaan.

Faktor kekuatan yang dimiliki oleh LKM-A PUAP Kabupaten Purbalingga termasuk satu-satuan bisnis di dalamnya, antara lain kompetensi khusus yang terdapat didalamnya yang berakibat pada pemilihan keunggulan kopetitif oleh unit usaha di pasaran. Contohnya keunggulan itu antara lain: kekuatan pada sumber keuangan citra positif, keunggulan di pasar, hubungan dengan pemasok, loyalitas penguna produk dan kepercayaan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut *Strength* (Kekuatan) LKM-A PUAP.⁴⁷

NO	Kekuatan (<i>Strenght</i>)
1	Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi pertanian paling bawah untuk anggota dan lingkungannya.
2	Pelayanan jemput bola, yang dilaksanakan sampai keposok desa, agar mempermudah angota tanpa harus menyita waktu untuk datang ke LKM-A PUAP
3	Adanya pelayanan online pembayaran telepon pembayaran rekening listrik untuk masyarakat pedesaan.
4	Adanya pelatihan yang diadakan LKM-A PUAP mulai dari

⁴⁷ Data analisis kesimpulan yang diambil pada halaman. 30-35.

	pengurus dan pengelola, agar lebih berkompeten baik dari pemahaman syariah maupun dalam kinerja, agar dapat memahami karakteristik masyarakat pedesaan.
5	Ada kantor yang jelas dengan perangkat administrasi yang memadai. Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan system manajemen keuangan yang rapih dan ilmiah.
6	Letak gedung/ kantor yang setrategis yang berada ditengah-tengah masyarakat pedesaan (Balai desa Setempat), agar lebih <i>menjangkau masyarakat desa</i> .
7	Lebih mengutamakan usaha-usaha produktif yang ada di desa.
8	Jelas penggunaannya untuk sektor yang halal yang ada di desa.

Tabel 4
Daftar kekuatan LKM-A PUAP dalam Pembangunan
Ekonomi Pedesaan

2. Analisis Terhadap Kelemahan LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi Prdesaan.

Faktor kelemahan yang terdapat dalam suatu bisnis tidak terkecuali LKM-A PUAP adalah keterbatasan atau kekuarangan dalam sumber keterampilan dan kemampuan yang menjadi penghalang bagi penampilan kinerja perusahaan yang memuaskan.⁴⁸

Dalam praktek, berbagai ketrampilan dan kekurangan kemampuan tersebut terlihat pada sarana yang dimiliki atau yang tidak dimiliki,

⁴⁸ Sondang P. Siagian, *Manajemen Strategik*, (Jakarta: Bumi aksara, 1998), hlm. 173.

Modal yang kurang, kemampuan manajerial yang rendah, ketrampilan pemasaran yang tidak sesuai dengan tuntutan pasar, produk yang tidak atau kurang diminati nasabah.

Berikut ini adalah kelemahan (*Weakness*) LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga:⁴⁹

NO	Kelemahan (<i>Weakness</i>)
1	Penggunaan produk yang belum optimal, tidak semuanya digunakan.
2	Kondisi gedung yang sempit.
3	LKM-A yang sudah berjalan belum mampu untuk melakukan jejaring dengan lembaga lain/terkait dalam rangka <i>mengembangkan usahanya</i> .
4	Banyak Pengurus dan pengelola yang kurang paham tentang kesyariahan dan kemampuan di bidang perbankan syariah untuk mendukung kinerja karena berhubungan langsung dengan masyarakat pedesaan.
5	Masih adanya biaya administrasi yang dilimpahkan ke nasabah
6	Fasilitas teknologi yang masih minim dan sederhana menjadikan kurang efektif.
7	Kurang cepat dan cermat dalam menggulirkan dana PUAP dikarenakan ; minimnya kemampuan personal pengelola, terlalu hati-hati (khawatir), kurang siapnya kondisi masyarakat

⁴⁹ Data analisis kesimpulan Yang diambil Pada hlm. 52-54.

	artinya masih banyak yang menganggap dana PUAP adalah dana Hibah yang untuk dibagi-bagi.
8	Modal LKM-A Hanya bersumber dari bantuan Deptan.
9	Rasa Memiliki dan Sense of Bussines yang Rendah.
10	Bagi pengelola LKM-A masih dianggap sebagai kegiatan sampingan.
11	Minim Produktifitas, berdampak pada minimnya penghasilan, dan akhirnya memunculkan perasaan tidak betah/kerasan.

Tabel 5
Daftar kelemahan LKM-A PUAP dalam pembangunan
Ekonomi Pedesaan

3. Analisis terhadap peluang LKM-A PUAP dalam Pembangunan
Ekonomi Pedesaan.

Faktor peluang (*Opportunity*), merupakan kondisi eksternal yang menunjang suatu organisasi untuk mencapai suatu objektifitas dan berbagai situasi lingkungan yang menguntungkan bagi suatu bisnis. Berikut adalah peluang (*Opportunity*) LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga:⁵⁰

NO	Peluang (<i>Opportunity</i>)
1	Tersedia modal/dana hibah atau pinjaman dari instansi pemerintah maupun swasta.
2	Peraturan pemerintah yang mendukung LKM-A

⁵⁰ Data analisis kesimpulan yang diambil pada hlm. 42, 45, 47.

3	Lebih dari 92 % dari struktur pengusaha nasional kita adalah usaha mikro (kecil bawah) yang salah satu faktor kesulitan mereka adalah masalah permodalan, sementara mereka kurang mengenal Bank atau Lembaga Keuangan dan atau sulit mengaksesnya.
4	Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim menunjukkan pasar yang masih luas untuk menambah dan memperluas pangsa pasar di pedesaan.
5	<i>Didukung dari jajaran pengurus dan manajemen serta lembaga lain yang memiliki basis komunitas dari kalangan Perangkat desa, kelompok tani dan para pengusaha sukses yang ada di desa.</i>
6	Karena memiliki banyak aset dan kantor yang jelas, masyarakat desa mempercayai LKM-A PUAP sebagai pengelola dana masyarakat.
7	Pembiayaan tidak di batasi bagi para petani, Masyarakat desa pun bisa mengakses pembiayaan asalkan memenuhi syarat.

Tabel 6
Daftar Peluang LKM-A PUAP dalam Pembangunan
Ekonomi Pedesaan.

4. Analisis terhadap ancaman LKM-A PUAP dalam Pembangunan
Ekonomi Pedesaan.

Faktor ancaman (*Threats*), merupakan merupakan kebalikan pengertian peluang. Dengan demikian dapat dikatakan ancaman adalah faktor-faktor lingkungan yang tidak menguntungkan situasi bisnis. Jika tidak diatasi, ancaman akan menjadi ganjalan bagi suatu bisnis yang bersangkutan baik untuk masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Berikut ancaman (*Threats*) LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga:

NO	Ancaman (<i>Threats</i>)
1	Adanya modal sebagian besar dari pihak ketiga
2	Banyak orang mendaftar menjadi anggota LKM-A PUAP dengan tujuan " <i>hanya</i> " untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tidak disertai kesadaran untuk menabung dan menanamkan modalnya di LKM-A PUAP.
3	Banyak anggota yang datang ke LKM-A PUAP hanya untuk <i>meminjam, tetapi jika ada kelebihan uang, mereka menabung di bank.</i>
4	Banyak anggota yang setelah mendapatkan pinjaman tidak mematuhi kewajibannya untuk mencicil secara teratur.
5	Banyak orang mendirikan LKM-A PUAP karena berharap akan mendapatkan fasilitas kredit murah dari pemerintah.
6	Banyak LKM-A PUAP yang sebagian besar modalnya tidak bersumber dari anggotanya, tetapi dari pihak luar yang memberikan beban bunga kepada LKM-A PUAP yang

	kemudian menyalurkannya kepada anggota dengan bunga yang tinggi. Akibatnya, fasilitas kredit dari LKM-A PUAP menjadi tidak menarik dan memberatkan anggotanya.
7	Banyak pilihan produk yang ditawarkan dari perbankan/koperasi lain yang ada di pedesaan.
8	Image LKM-A PUAP yang berada di desa-desa, khususnya dari beberapa oknum pengelola LKM-A PUAP yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengganggu posisi LKM-A PUAP

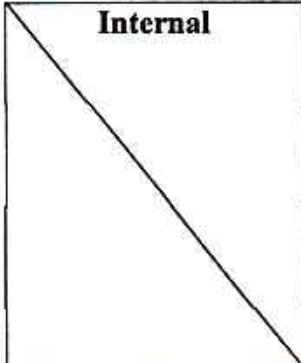
Tabel 7
Daftar ancaman LKM-A PUAP dalam Pembangunan
Ekonomi Pedesaan

5. Matrik SWOT LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan.
- Setelah terdapat *listing* hasil dari beberapa komponen-komponen faktor SWOT, maka langkah penyuluhan analisis SWOT berikutnya adalah menilai dan memasukan kompinen-komponen tersebut melalui cara yang dilakukan penulis melalui pendekatan kualitatif Matriks SWOT yang telah dikembangkan Kearns.
- a. Sel A adalah strategi SO (*Strength, Opportunity*) merupakan setrategi yang disusun dengan cara menggunakan seluruh kekuatan untuk merebut dan memaafkan peluang yang sebenar-benarnya.
 - b. Sel B adalah strategi ST (*Srength, Threats*) merupakan setrategi yang disusun dengan cara menggunakan semua kekuatan untuk mengatasi ancaman.

- c. Sel C adakah strategi WO (*Weakness, Opportunity*) merupakan setrategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
- d. Sel D adalah strategi WT (*Weakness, Threats*) merupakan setrategi yang disusun dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada serta untuk menghindari ancaman.⁵¹

Berikut analisis strategi yang dikembangkan melalui berbagai komponen faktor internal dan eksternal LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga berdasarkan Kualitatif Kears.

Matrik SWOT LKM-A PUAP dalam pembangunan Ekonomi Pedesaan: dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga yang telah dijelaskan di atas, maka strategi yang muncul dari perpaduan antara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:⁵²

Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	1. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan	1. Penggunaan produk yang belum optimal, tidak semuanya

⁵¹ Ferdi Rangkuti, *SWOT Balanced Scorecard teknik Menyusun Strategi Korporat yang Efektif plus Cara mengelola Kinerja dan Resiko* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 64.

⁵² Data analisis kesimpulan yang diambil pada halaman. 61-66.

	<p>pemanfaatan ekonomi pertanian paling bawah untuk anggota dan lingkungannya</p> <p>2. <i>Pelayanan jemput bola, yang dilaksanakan sampai keposok desa, agar mempermudah anggota tanpa harus menyita waktu untuk datang ke LKM-A PUAP.</i></p> <p>3. <i>Adanya</i></p>	<p>di gunakan.</p> <p>2. <i>LKM-A yang sudah berjalan belum mampu untuk melakukan jejaring dengan lembaga lain/terkait dalam rangka mengembangkan usahanya.</i></p> <p>3. <i>Banyak Pengurus dan pengelola yang kurang paham tentang kesyariahan dan kemampuan di bidang perbankan syariah untuk mendukung kinerja karena berhubungan langsung dengan</i></p>
--	---	---

	<p>pelayanan online pembayaran telepon pembayaran rekening listrik untuk masyarakat pedesaan, yang di huka 3 hari kerja dalam seminggu.</p> <p>4. Adanya pelatihan yang diadakan LKM-A PUAP mulai dari pengurus dan pengelola, agar lebi berkompeten baik dari pemahaman</p>	<p>masyarakat pedesaan.</p> <p>4. Kondisi gedung yang sempit.</p> <p>5. Fasilitas teknologi yang masih minim dan sederhana menjadikan kurang efektif.</p> <p>6. Kurang cepat dan cermat dalam menggulirkan dana PUAP dikarenakan ; minimnya kemampuan personal pengelola, terlalu hati-hati "khawatir", kurang siapnya kondisi</p>
--	--	--

	<p>syariah maupun dalamkinerja, agar dapat memahami karakteristik masyarakat pedesaan.</p> <p>5. Ada kantor yang jelas dengan perangkat administrasi yang memadai. Administrasi pembukuan dan prosedur ditata dengan system manajemen keuangan yang rapih dan ilmiah</p>	<p>masyarakat artinya masih banyak yang menganggap dana PUAP adalah dana Hibah yang untuk dibagi-bagi.</p> <p>7. Masih adanya biaya administrasi yang dilimpahkan ke nasabah</p> <p>8. Modal LKM-A Hanya bersumber dari bantuan Deptan.</p> <p>9. Rasa Memiliki dan Sense of Bussines yang Rendah</p> <p>10. Bagi pengelola LKM-A masih</p>
--	--	---

	<p>6. Letak gedung/kantor yang strategis yang berada ditengah-tengah masyarakat pedesaan (Balai desa Setempat), agar lebih menjangkau masyarakat desa.</p> <p>7. Lebih mengutamakan usaha-usaha produktif yang ada di desa.</p> <p>8. Jelas penggunaannya untuk sektor</p>	<p>dianggap sebagai kegiatan sampingan</p> <p>11. Minim Produktifitas, berdampak pada minimnya penghasilan, dan akhirnya memunculkan perasaan tidak betah/kerasan</p>
--	--	---

Eksternal	yang halal yang ada di desa.	
Peluang (O) 1. Tersedia modal/dana hibah atau pinjaman dari instansi pemerintah maupun swasta. 2. Peraturan pemerintah yang mendukung LKM-A 3. Lebih dari 92 % dari struktur pengusaha nasional kita adalah usaha mikro (kecil bawah) yang salah satu faktor kesulitan mereka	Sel A (Strategi SO) 1. Penguatan dan perluasan pangsa pasar di pedesaan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada. 2. Meningkatkan image di masyarakat pedesaan dengan mendekatkan prinsip ekonomi syariah. 3. Meningkatkan	Sel C (Strategi WO) 1. Adanya modal dari pihak ketiga dapat memberikan peningkatan pemahaman terhadap kosep-koperasi syariah 2. Dengan sistem bagi hasil yang dianut oleh LKM-A memberikan keuntungan kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan

<p>adalah masalah permodalan, sementara mereka kurang mengenal Bank atau Lembaga Keuangan dan atau sulit mengaksesnya.</p>	<p><i>service excellent dan ketaatan terhadap prinsip syariah</i></p>	<p>kondisi gedung yang ada</p>
<p>4. Jumlah penduduk Indonesia yang sebagian besar adalah muslim menunjukan pasar yang masih luas untuk menambah dan memperluas pangsa pasar di pedesaan.</p>	<p>4. Menambah target, baik dari segi nasabah yang non pertanian dan potensial dengan menawarkan kemitraaan.</p>	<p>3. Memanfaatkan dan mengalokasikan modal dengan tepat sasaran terhadap masyarakat pedesaan yang membutuhkan.</p>
<p>5. Didukung dari jajaran pengurus dan manajemen</p>	<p>5. Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah.</p> <p>6. Mendorong</p>	<p>4. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan.</p> <p>5. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung kinerja LKM-A memberikan motifasi</p>

<p>serta lembaga lain yang memiliki basis komunitas dari kalangan Perangkat desa, kelompok tani dan para pengusaha sukses yang ada di desa.</p>	<p>peningkatan pembiayaan bagi hasil dengan performa baik.</p>	<p>pengurus/karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah</p>
<p>6. Karena memiliki banyak aset dan kantor yang jelas, masyarakat desa mempercayai LKM-A PUAP sebagai pengelola dana masyarakat.</p>		
<p>7. Pembiayaan tidak di batasi bagi para petani, Masyarakat desa pun bisa</p>		

<p>mengakses pembiayaan asalkan memenuhi syarat.</p>		
<p>Ancaman (T)</p> <p>1. Adanya modal sebagian besar dari pihak ketiga</p> <p>2. Banyak orang mendaftar menjadi anggota LKM-A PUAP dengan tujuan “<i>hanya</i>” untuk mendapatkan pinjaman, tetapi tidak disertai kesadaran bahwa dana yang digunakan LKM-A PUAP untuk memberikan pinjaman atau</p>	<p>Sel B (Strategi ST)</p> <p>1. Memberikan modal kerja untu pembiayaan mikro di pedesaan, melihat belum ada Lembaga keuangan/Koprasi yang memberikan pembiayaan tersebut, bila ada jarang yang memberikan terhadap</p>	<p>Sel D (Strategi WT)</p> <p>1. Adanya anggota yang tidak <i>memahami</i> konsep syariah menjadikan Pengurus, karyawan semangat untuk melakukan pembinaan kepada anggota</p> <p>2. Mengadakan program pelatihan terhadap pengurus dan pengelola untuk</p>

<p>Pembiayaan sebenarnya bersumber dari simpanan dan tabungan mereka sendiri.</p>	<p>pembiayaan mikro.</p>	<p>menambah intelektualitas, meningkatkan kompetensi para karyawan di bidangnya.</p>
<p>3. Banyak anggota yang datang ke LKM-A PUAP hanya untuk meminjam, tetapi jika ada kelebihan uang, mereka menabung di bank.</p>	<p>2. Mempertahankan cirihas prodak dengan berbasis syariah dan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP).</p>	<p>3. Mengembangkan produk-produk yang terbaik kepada nasabah khususnya di pedesaan.</p>
<p>Banyak anggota yang setelah mendapatkan pinjaman tidak mematuhi kewajibannya untuk mencicil</p>		<p>4. perlu dikembangkan rasa memiliki yang loyal / setia pada LKM-A PUAP</p> <p>5. LKM-A PUAP harus benar-benar diyakini dibentuk dan dikembangkan</p>

secara teratur.		atas kekuatan
5. Banyak orang mendirikan LKM-A PUAP karena berharap akan mendapatkan fasilitas kredit murah dari pemerintah.		masyarakat itu sendiri.
6. Banyak LKM-A PUAP yang sebagian besar modalnya tidak bersumber dari anggotanya, tetapi dari pihak luar yang memberikan beban bunga kepada LKM-A PUAP yang kemudian		

<p>menyalurkannya kepada anggota dengan bunga yang tinggi. Akibatnya, fasilitas kredit dari LKM-A PUAP menjadi tidak menarik dan memberatkan anggotanya.</p>		
<p>7. Banyak pilihan produk yang ditawarkan dari perbankan/kopras i lain yang ada di pedesaan.</p>		
<p>8. Image LKM-A PUAP yang berada di desa-desa, khususnya dari beberapa oknum pengelola</p>		

LKM-A PUAP yang bermasalah dan kurang amanah sangat mengangu posisi LKM-A PUAP		
---	--	--

Tabel 8
Matriks SWOT LKM-A PUAP dalam Pembangunan Ekonomi
Pedesaan

Dengan berbagai komponen-komponen analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga yang telah di jelaskan di atas, maka setrategi yang muncul dari perpaduan antara masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO

- a. Penguatan dan perluasan pangsa pasar di pedesaan dengan memanfaatkan jaringan yang sudah ada.
- b. Meningkatkan image di masyarakat pedesaan dengan mendekatkan prinsip ekonomi syariah.
- c. Memingkatkan pelayanan yang profesional kepada nasabah.
- d. Menambah target, baik dari segi nasabah yang non pertanian dan potensial dengan menawarkan kemitraaan.
- e. Meningkatkan fungsi intermediasi, efesiensi dan daya saing industri perbankan syariah.

- f. Mendorong peningkatan pembiayaan bagi hasil dengan performa baik.

2. Strategi WO

- a. Adanya modal dari pihak ketiga dapat memberikan peningkatan pemahaman terhadap kosep-koperasi syariah.
- b. Dengan sistem bagi hasil yang dianut oleh LKM-A memberikan keuntungan kedua belah pihak sehingga dapat meningkatkan kondisi gedung yang ada
- c. Memanfaatkan dan menalokasikan modal dengan tepat sasaran terhadap masyarakat pedesaan yang membutuhkan.
- d. Memanfaatkan teknologi yang ada untuk meningkatkan kinerja pelayanan.
- e. Adanya peraturan pemerintah yang mendukung kinerja LKM-A memberikan motifasi pengurus/karyawan dalam memberikan pelayanan kepada nasabah.

3. Strategi ST

- a. Memberikan modal kerja untuk pembiayaan mikro di pedesaan, melihat belum ada Lembaga keuangan/Koprasi yang memberikan pembiayaan tersebut, bila ada jarang yang memberikan terhadap pembiayaan mikro.
- b. Mempertahankan cirih as prodak dengan berbasis syariah dan Pengembangan Usaha Agrobisnis Pedesaan (PUAP).

4. Strategi WT

- a. Mengadakan program pelatihan terhadap Pengurus dan Pengelola untuk menambah intelektualitas, meningkatkan kompetensi para karyawan di bidangnya.
- b. Adanya anggota yang tidak memahami konsep syariah menjadikan Pengurus, karyawan semangat.
- c. Mengembangkan produk-produk yang terbaik kepada nasabah khususnya di pedesaan.
- d. perlu dikembangkan rasa memiliki yang loyal / setia pada LKM-A PUAP
- e. LKM-A PUAP harus benar-benar diyakini dibentuk dan dikembangkan atas kekuatan masyarakat itu sendiri

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data yang telah penulis himpun dan analisa, dari seluruh rangkaian penulisan skripsi ini maka dapat disimpulkan bahwa:

LKM-A PUAP memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan khususnya bagi usaha pertanian, peternakan dan pedagang kecil di Kabupaten Purbalingga yang masih banyak memerlukan suntikan modal maupun arahan-arahan yang sistematis dari lembaga keuangan yang bisa menolong mereka dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Hal ini terlihat dengan berdirinya LKM-A PUAP masyarakat petani dan usaha mikro kecil menengah tidak lagi kesulitan akan modal usaha dan lebih fokus dengan jenis usaha yang dijalannya tanpa harus pinjam ke *rentenir* dengan suku bunga tinggi, masyarakat juga dimudahkan dengan jual-beli *murobahah* yang ditawarkan oleh LKM-A PUAP sehingga nasabah/anggota bisa memesan barang yang dibutuhkan tanpa harus pergi jauh kemana-mana, mengurangi kemiskinan dan pengangguran di pedesaan, meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, pengurus Gapoktan, memberdayakan kelembagaan petani dan Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi ke-Lembagaan Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).

Peran LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga dilihat dari SWOT antara lain:

1. Kekeuatan (*Strength*); LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga lebih mengutamakan untuk usaha-usaha yang produktif yang ada di masyarakat pedesaa.
2. Kelemahan (*Weakness*); Sebagian besar Pengurus dan Pengelola LKM-A PUAP kurang pemahaman tentang produk dan akad syari'ah, masih lemahnya dibidang perbankan syariah serta fasilitas teknologi yang masih minim.
3. Peluang (*Opportunity*); Pangsa pasar yang masih luas akan memberikan kesempatan untuk menambah dan mengembangkan jaringan pemasaran sampai ke plosok desa.
4. Ancaman (*Threat*); Pesaingan dari lembaga sejenis dan perbankan kususnya perbankan syariah serta konvensional yang ada di pedesaan.

B. Saran-saran

Setelah penulis paparkan tentang kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang, maka dapat disimpulkan dengan strategi-strategi dapat di jadikan rekomendasi lembaga-lembaga keuangan dalam rangka upaya LKM-A PUAP dalam Pengembangan ekonomi pedesaan.

Dengan kesimpulan yang didapat melalui proses analisis tersebut, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Memanfaatkan dan menerapkan produk-produk yang sudah ada agar lebih bermanfaat dan berguna demi kemajuan LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga.
2. Dengan berbagai keterbatasannya, ekonomi pedesaan khususnya terhadap Petani dan UKM harus menjadi prioritas utama demi kemajuan perekonomian umat dengan selalu melakukan pendampingan dan pembinaan yang nyata.

Berdasarkan visinya "Menjadi lembaga keuangan yang bersifat mandiri, sehat dan profesional, yang kualitas ibadah anggotanya meningkat sedemikian rupa sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat manusia pada umumnya" LKM-A PUAP harus selalu konsisten dan terus menajamkan fokus transaksinya ke wilayah usaha kecil sehingga muncul pemerataan modal dari dalam sirkulasi pembiayaan. Selain itu untuk mendukung kegiatan transaksi keuangannya LKM-A PUAP juga harus dengan segera Membentuk badan hukum dan perijinannya.

PRODUK LKMA PUAP

1. Simpanan Pokok Khusus/ Modal Penyelenggaraan
 - Satu lembar Rp 250 ribu
 - Perorangan minimal 2 lb
 - lembaga/yayasan minimal 10 lb
 - Bagi hasil setiap tahun
2. Simpanan Pendidikan (Wadiah)
 - Setoran awal Rp 10 ribu
 - Penarikan di tahun ajaran baru
 - Bagi hasil setiap bulan
 - Bonus Beasiswa
3. Simpanan Idul Fitri (Wadiah)
 - Setoran awal Rp 10 ribu
 - Penarikan menjelang lebaran
 - Bagi hasil setiap bulan
 - Ada bonus/hadiah
4. Simpanan Qurban (Wadiah)
 - Setoran awal Rp 10 ribu
 - Penarikan menjelang Idul Adha
 - Bagi hasil setiap bulan
 - Ada bonus/hadiah
5. Simpanan Sukarela/ Menabung (Wadiah)
 - Setoran awal Rp 10 ribu
 - Penarikan bisa seaktu-waktu
 - Bagi hasil setiap bulan
 - Ada bonus/hadiah

B U K A
SENIN S/D KAMIS
JAM. 08.00-12.00 WIB

Syarat menjadi anggota

1. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan biodata anggota/nasabah
2. Foto copy KTP yang masih berlaku
3. Pas foto 3 x 4 (2 lembar)
4. Menyerahkan Simpanan Pokok Rp 25.000,-
5. Menyerahkan Simpanan Wajib Rp 3.000,-/bulan

Keuntungan menjadi anggota

- Dilyani sistem jemput bola dan pelayanan kantor sistem komputerisasi perbankan.
- Simpanan ada bagi hasil.
- Simpanan bisa dijadikan "agunan".
- Bisa menikmati produk-produk yang dilyani di LKMA dan ikut memiliki LKMA.

Pengurus Gapoktan

"SUBUR"

- Ketua : SUPARMIN
- Sekretaris : JOKO NURTAQWA
- Bendahara : H. SUNARDI

Badan Pengawas :

- H. Sumpyar
- H. Al Amin Imam M, SH

Pengelola LKMA PUAP

- Manager : MUIIMAH
- Staff Manager : MUNTOMAH

LKMA PUAP SUBUR



DESA KEDUNGJATI

KEC. BUKATEJA KAB. PURBALINGGA

Amnana Keunggulan Syariah Pendidikan Lembaga Keuangan Syariah Profesional

INSYALLOH DIKELOLA SESUAI
PRINSIP SYARIAH ISLAM
DAN PROFESIONAL



KANTOR

Jl. Raya Bukateja Kutawia KM 2,
Baloi Desa Kedungjati



LKMA PUAP SUBUR

MUKADIMAH

- G. LKMA "SUBUR" adalah lembaga keuangan mikro agribisnis yang melakukan kegiatan usaha insya Allah sesuai prinsip syariah Islam.
- G. LKMA "SUBUR" sukusi untuk menyelamatkan umat dari jeratan riba.
- G. Supaya harta jangan hanya beredar diantara orang kaya, guna meningkatkan ekonomi umat khususnya petani supaya adil dan merata.
- G. Soalnya menjalani kehidupan baru (hijrah), bersihkan rizki, sucikan hati dan perbuatan agar tercipta akhlak Islami yang diridhoi Allah Swt.
- DASAR-DASAR HUKUM
1. QS. Al Baqarah : 278
Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba, jika kamu orang yang beriman.
 2. QS. Al Baqarah : 279
Maka kamu jika tidak mau berhenti (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rosul-Nya akan menerangimu ...
 3. QS. Ali Imron : 130
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ...

VISI & MISI

LKMA PUAP SUBUR

VISI : Menjadi lembaga keuangan yang bersifat mandiri, sehat dan profesional, yang kualitas ibodah anggotanya meningkat sehingga mampu berperan menjadi wakil pengabdai Allah memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

MISI :

1. Mewujudkan gerakan pembebasan anggota dan masyarakat dari belenggu rentenir, jerat kemiskinan dan ekonomi ribawi.
2. Gerakan pemberdayaan untuk meningkatkan kapasitas dalam kegiatan agribisnis.
3. Menuju tatanan perekonomian yang makmur dan maju membangun struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran, berkemajuan yang diridhoi Sang Pencipta.

AYO NABUNG

di LKMA SUBUR

untuk biaya hidup di masa depan dengan nabung sekaligus membantu umat kita yang kurang mampu dalam usaha yang produktif

LEMBAGA KEUANGAN ISLAMI
KEBANGGAAN DESA KITA

- LKMA Terbaik Peringkat I Tingkat Kabupaten Purbalingga Tahun 2010
- LKMA Terbaik Peringkat II Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

mari kita kembangkan bersama

BUTUH MODAL USAHA?

- A. PROSES MUDAH
Cukup datang ke kantor kami
- Syarat-syarat permohonan pembiayaan :
1. Menjadi anggota LKMA
 2. Mengisi formulir permohonan pembiayaan
 3. Mengisi surat perjanjian akad pembiayaan
 4. Mengisi surat persetujuan suami/istri
 5. Menuliskan jaminan/agunan
 6. Foto copy KTP suami/istri yg masih berlaku
 7. Foto copy Kk
 8. Persyaratan dimasukkan dalam stapmap
 9. Akan disurvei kegiatan usahanya

LEBIH DEKAT - PROSESNYA CEPAT PERYARATAN MUDAH - AMAN

- B. JAMINAN BISA BERUPA BARANG
YANG DIMILIKI



Il. Raya - Kabupaten Kutawisul 2
Kselumetati-Hubateja



LKMA PUAP MUGI RAHAYU MITRA KEUANGAN ANDA

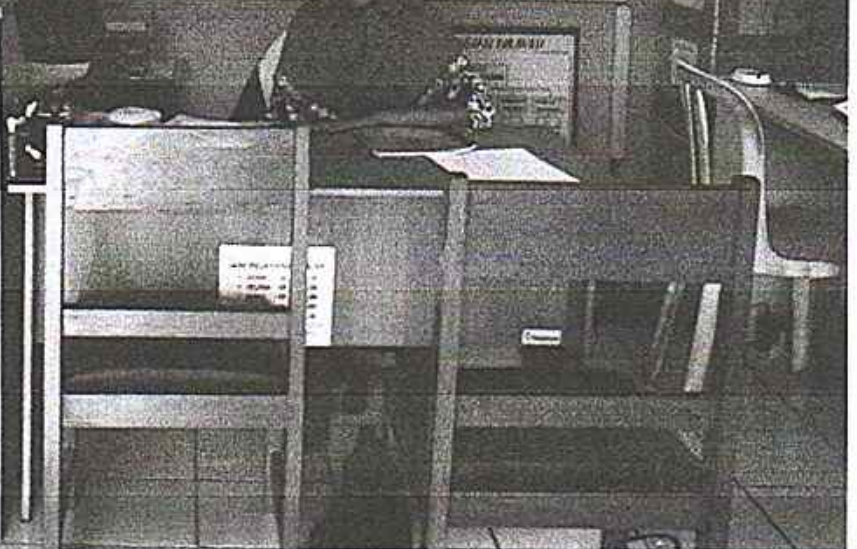
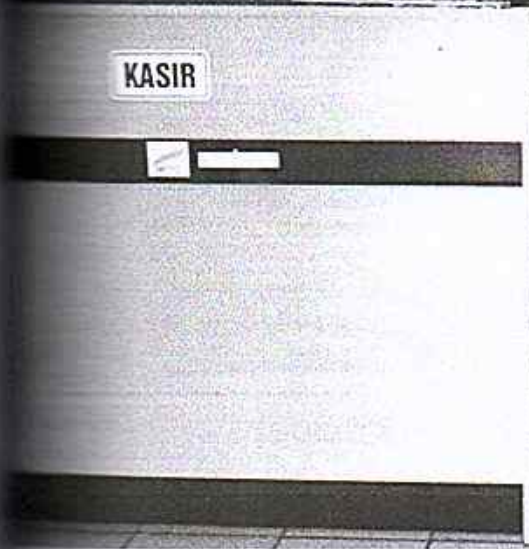
Membantu Pelani Mendapatkan Modal Usaha Terus
MELAYANI

- SIMPANAN SUKARELA
- SIMPANAN QURBAN
- SIMPANAN HARI RAYA

MENEMPA PESANAN
SEGALA MACAM
BADANG ELEKTRONIK
CASH / KREDIT

*Melayani Dengan
Senang Hati*

KASIR

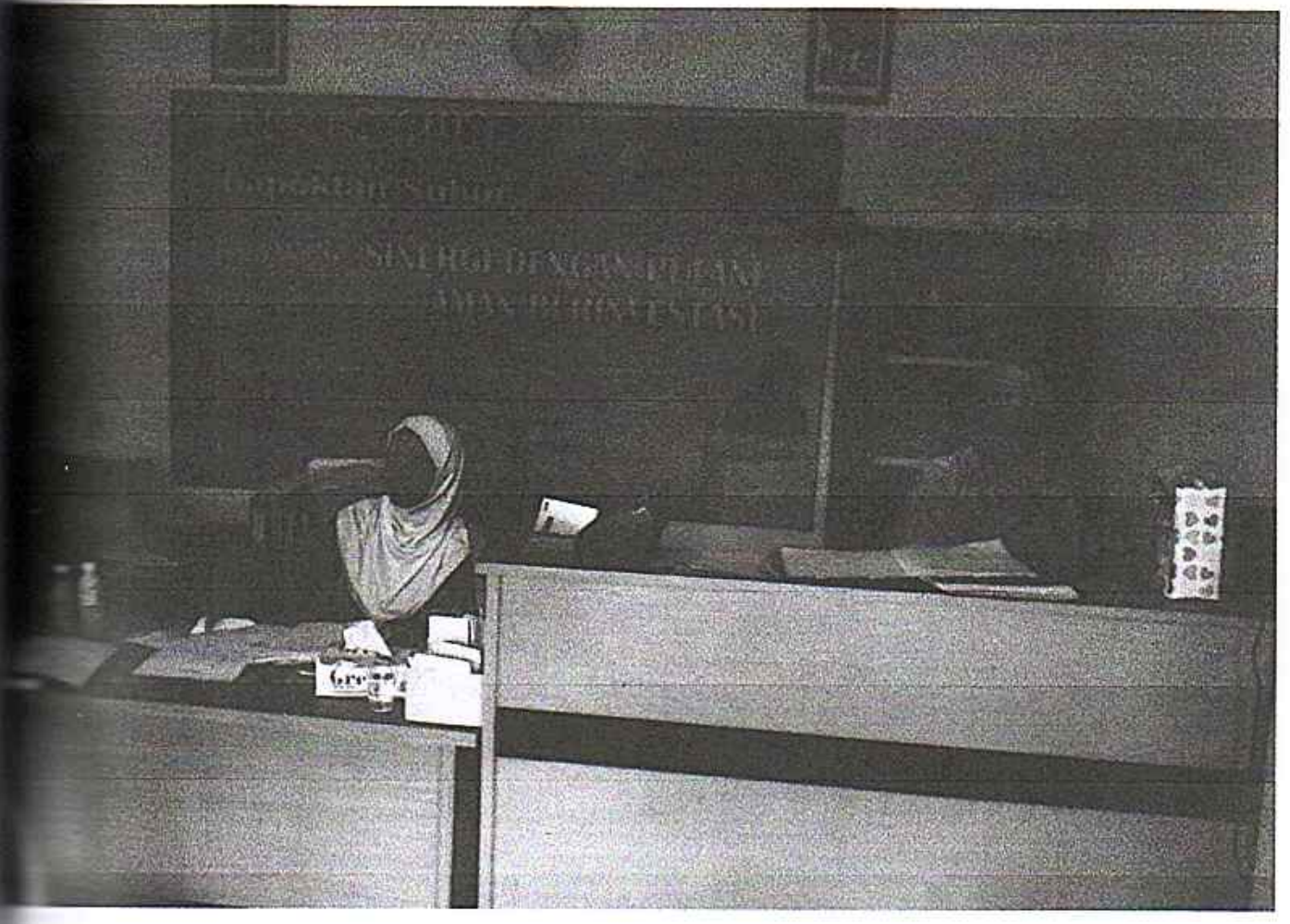


KM-A PUNP
Koperasi Keuangan Mikro Agribisnis
Kopoktan Subur



SINERGI DENGAN PETANI AMAN BERINVESTASI

...petani mendapatkan modal yang dapat
...petani meningkatkan
...petani



ANALISA PEMBIAYAAN

Nama Pemohon :

Nama Suami/Istri :

Alamat Lengkap :

Jenis Usaha :

No KTP :

No	Keterangan	Ya	Tidak
A	CARAKTER/WATAK DAN KEPERIBADIAN NASABAH		
1	Amanah, jujur, disiplin dan selalu menepati janji (info dari nara sumber lain)		
2	Melakuka sholat 5 waktu/ke masjid dan ikut berjamaah yasin, tahlil dll sesuai ajaran agama / Rajin beribadah		
3	Mempunyai nama baik di lingkungan dan keadaan rumah tangga rukun damai		
4	Menabung secara teratur dan terus menerus		
5	Memiliki kepekaan sosial ai membayar zakat/ infak/ shadakah sebagian pendapatan untuk orang lain		
6	Membayar kembali pinjaman (yang lalu) secara disiplin (bukti ditunjukkan)		
B	CAPACITY/KEMAMPUAN NASABAH		
1	Usaha sudah berjalan 2 tahun ke atas		
2	Tempat usaha maupun tempat tinggal permanen dan milik sendiri		
3	Bahan baku mudah, pemasaran bagus, punya langganan tetap dan pembayaran kewajiban baik		
4	Perkembangan usaha baik, tingkat keuntungan% dan mampu untuk membayar kewajiban		
5	Memiliki hutang di tempat lain, sebutkansebesar Rp		
C	CAPITAL/MODAL DARI NASABAH		
1	Memiliki aset usaha berupa tanah, rumah atau barang dagangan senilai		
2	Memiliki tabungan di bank/ koperasi sebesar Rp atau di LKMA sebesar		
3	Tingkat keuntungan usaha layak dibanding kewajiban membayar pembiayaan		
4	Pembiayaan akan digunakan untuk modal usaha (syirkah) atau pembelian barang		
D	COLLATERAL/JAMINAN PEMBIAYAAN		
1	Suami/Istri bersedia ikut menandatangani dokumen perjanjian pembiayaan		
2	Memiliki jaminan yang cukup sesuai jumlah pinjaman (sebutkan.....)		
3	Ada pihak lain yang menjamin pembiayaan (sebutkan.....)		
E	CONDITION/KEADAAN EKONOMI LINGKUNGAN USAHA		
1	Adat istiadat, kebudayaan dan agama mayoritas masyarakat sekitar mendukung		
2	Jenis usaha legal menurut hukum dan halal menurut agama		
3	Kondisi lingkungan mendukung		
4	Kondisi iklim dan cuaca mendukung		

PERHITUNGAN KELAYAKAN USAHA

A. Perhitungan Laba Usaha per Bulan

- 1. Pendapatan kotor Usaha/harga jual
 - 2. Harga Pokok Barang/kulakan
 - 3. Biaya Operasional Usaha
- Labas Usaha/Pendapatan Bersih**

Rp
Rp
Rp
Rp

B. Perhitungan Pendapatan Keluarga per Bulan

- 1. Labas Usaha per Bulan (A)
 - 2. Pendapatan (di luar A) dari usaha suami/istri/lain
- Jumlah Pendapatan seluruh keluarga**

Rp
Rp
Rp

C. Biaya di Luar Usaha (biaya hidup keluarga)

- 1. Kebutuhan Makan Keluarga
- 2. Biaya Pendidikan Anak
- 3. Biaya Listrik, telpon, air, dll
- 4. Biaya Lain-lain

Rp
Rp
Rp
Rp

Total biaya keluarga

Rp

D. Pendapatan Bersih (B-C)

Rp

E. Rasio angsuran sekitar 45% dari pendapatan bersih (D)

Rp

F. Jumlah pembiayaan maksimal yang dapat diberikan

Rasio Angsuran (E) x jangka waktu bulan

Rp

G. Jenis Pembiayaan dengan bagi hasil/margin

Rp

Total pembayaran ke LKMA PUAP

- 1. Angsuran pokok
- 2. Bagi Hasil (proyeksi)/margin
- 3. Infaq
- 4. Tabungan

Rp
Rp
Rp
Rp

Total Setoran per minggu/per bulan

Rp

CATATAN:

.....
Manajer Pendamping

.....
Analis Pembiayaan

.....

.....



LEMBAGA KEUANGAN MIKRO AGRIBISNIS
LKM-A PUAP
 PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN



FORMULIR ANGGOTA

LKM-A

Tgl. □□/□□/□□

Keanggotaan Khusus Biasa
 Simpanan Pokok Rp. Rp.
 Pembayaran Simpanan Pokok Tunai / Cash Angsuran x

DATA PEMOHON

Nama :
 Jenis Kelamin :
 No. KTP / SIM :
 Tempat / Tgl. Lahir :
 Alamat :
 Pekerjaan :
 Telepon / Hp. :

INFORMASI LAIN

Simpanan Wajib Bulanan Rp.
 Bayar Tiap Bulan Auto Debet Rek. (a.n Sendiri)

Bersama ini, saya mengajukan permohonan menjadi Anggota di LKM-A dan sehubungan dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Contoh Tanda Tangan

Nama Pemohon & Tanda Tangan

(.....)



FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

LKM-A

Tgl. /

PRODUK

- Simpanan SIMPERTAN Simpanan QURBAN
 Simpanan PENDIDIKAN Simpanan HAFITRI Lainnya

DATA PEMOHON

Nama
Jenis Kelamin
No. KTP / SIM
Tempat / Tgl. Lahir
Alamat
Pekerjaan
Setoran Awal
Telepon / Hp

INFORMASI LAIN

Pekerjaan Diambil Sendiri Diantar Petugas LKM-A

Bila Penyimpanan Harian/Berkala

Disetor Sendiri Diambil oleh Petugas LKM-A Setiap

Bersama ini, saya mengajukan permohonan menjadi penyimpan dana di LKM-A dan dengan permohonan ini, saya menyatakan bahwa keterangan diatas adalah benar dan saya sanggup untuk mematuhi ketentuan-ketentuan

Contoh Tanda Tangan

Nama Pemohon & Tanda Tangan

(.....)



Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
LKM-A PUPP
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan



KARTU KONTROL PEMBIAYAAN

Nama: _____ Tgl. Realisasi: _____
No. Anggota: _____ Tgl. Jatuh Tempo: _____
Nama Poktan: _____ Jatuh Tempo: _____
Alamat: _____ Jumlah Pembiayaan: _____
No. KTP: _____ Margin / Basil: _____

TOTAL PEMBAYARAN	ANGSURAN POKOK	MARGIN / BAGI HASIL	SIMPANAN WAJIB

ANG-SURAN KE-	TANGGAL	ANGSURAN		SISA PEMBIAYAAN	SIMPANAN WAJIB	PARAF
		POKOK	BASIL			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						



Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
LKM-A PUMP
Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan



KARTU KONTROL PEMBIAYAAN

Nama : Tgl. Realisasi :
No. Anggota : Tgl. Jatuh Tempo :
Nama Poktan : Jatuh Tempo :
Alamat : Jumlah Pembiayaan :
No. KTP : Margin / Basil :

TOTAL PEMBAYARAN	ANGSURAN POKOK	MARGIN / BAGI HASIL	SIMPANAN WAJIB

ANG-SURAN KE-	TANGGAL	ANGSURAN		SISA PEMBIAYAAN	SIMPANAN WAJIB	PARAF
		POKOK	BASIL			
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						

KETERANGAN PEMBIAYAAN

TGL. REALISASI : _____
TGL. JATUH TEMPO : _____
JANGKA WAKTU : _____
SISTEM ANGSURAN : _____
BESAR PEMBIAYAAN : _____
MARGIN / BAHAS : _____

RINCIAN ANGSURAN

BESAR ANGSURAN : _____
ANGSURAN POKOK : _____
MARGIN / BAHAS : _____
SIMPANAN WAJIB : _____
JADWAL ANGSURAN : _____



KARTU ANGSURAN

No. Akad : _____
Nama Anggota : _____
Nama Poktan : _____
Alamat : _____
No. KTP : _____

Angsuran harap dibayar tepat waktu sesuai jadwal angsuran yang telah disepakati, apabila melewati tanggal kesepakatan maka akan dikenakan denda sesuai aturan yang ada.
Terima kasih atas perhatiannya.

Nasabah : _____ Manager LKM-A

(.....) (.....)



SLIP PENARIKAN

Jenis Simpanan

- Simpanan SIMPERTAN Simpanan QURBAN
 Simpanan PENDIDIKAN Simpanan HAFITRI Lainnya

Tanggal :

Nomor Rekening

:

Nama Pemilik Rekening

:

Jumlah Penarikan

: Rp.

Terbilang

:

Manager LKM-A

Teller

Penerima

SLIP REALISASI PEMBIAYAAN

No. Rekening :

Nama Anggota :

Alamat :

No. KTP/SIM :

Jangka Waktu :

Tgl Jatuh Tempo :

Manager	Teller	Pemohon

Jumlah Pembiayaan : Rp.

Basil/Margin/Sewa : Rp.

Biaya :

1. Administrasi : Rp.

2. Materai : Rp.

3. Simpanan Pokok : Rp.

4. Angs. Simp. Wajib : Rp.

JUMLAH : Rp.

TERBILANG :

Tgl.



Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis
LKM-A PUPP
 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan



No Slip

Tanggal

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

SLIP ANGSURAN PEMBIAYAAN

No Rekening Pembiayaan: _____ Nama: _____

SETORAN	JUMLAH
Angsuran Pokok Ke ...	Rp. _____
Bahas / Margin	Rp. _____
Simpanan Wajib Pembiayaan	Rp. _____
Kifarat Akad	Rp. _____
Infak	Rp. _____
Lain-lain	Rp. _____
JUMLAH	Rp. _____

Terbilang :

PENGELOLA LKM-A
 Kasir Manager

Penyetor

(.....)

*Seri apabila ada cetak validasi atau tanda tangan yang berwenang



Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

LKM-A PUMP

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

Simpanan syariah



Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis

LKM-A PUMP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan

**NERACA KEUANGAN**

LKM-A "MUGI RAHAYU"

Bandungan,Kejobong,Purbalingga , Jawa Tengah

Per Tanggal : 30 Desember 2013

AKTIVA (Alokasi Dana)			AKTIVA (Sumber Dana)		
. Aktiva Lancar			Kewajiban Jangka Panjang		
1. Kas	Rp	14.528.890	1. Hutang Dana BRI	Rp.	91.600.000
2. Rekening di Bank 1 (BRI)	Rp		2. Dana Pihak Ke-3	Rp.	
3. Rekening di Bank 2 (BKK)	Rp	15.200.000	3. Kewajiban Jangka Panjang Lainnya	Rp.	
4. Piutang / Pembiayaan	Rp	263.457.000	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp.	91.600.000
5. Akumulasi Penghapusan Piutang An	Rp		Kewajiban Jangka Pendek		
6. Penyertaan pada pihak lain	Rp		4. Simpanan Sukarela	Rp.	17.572.000
7. Beban dibayar di muka	Rp		5. Simpanan Hari Raya (SHR)	Rp.	
8. Penyusutan beban dibayar di muka	Rp		6. Simpanan Pendidikan	Rp.	
9. Persediaan Barang	Rp		7. Simpanan Qurban	Rp.	
10. Persediaan Deposit PPOB	Rp		8. Hutang Jangka Pendek Lainnya	Rp.	30.000.000
11. Persediaan Pupuk / Obat	Rp		9. Dana Anggota (belum dibagikan)	Rp.	
12. Persediaan Material	Rp	360.000	10. Bonus Pengurus (belum dibagikan)	Rp.	
13. -	Rp		11. Bonus Pengelola (belum dibagikan)	Rp.	
14. -	Rp		12. Dana Audit (belum dibagikan)	Rp.	
15. -	Rp		13. Dana Gapoktan (belum dibagikan)	Rp.	
16. -	Rp		14. Dana Desa (belum dibagikan)	Rp.	
17. -	Rp		15. Dana Pembina/Pendampingan (belum	Rp.	
18. -	Rp		Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp.	47.572.000
19. -	Rp		Modal Sendiri		
20. -	Rp		16. Simpanan Pokok	Rp.	5.940.000
21. -	Rp		17. Simpanan Wajib	Rp.	22.212.000
22. -	Rp		18. Hibah BLM PUAP	Rp.	100.000.000
23. -	Rp		19. Hibah Lainnya	Rp.	
Jumlah Aktiva Lancar	Rp	293.648.890	20. Sumber Modal Lainnya	Rp.	
. Aktiva Tetap			21. Cadangan Penghapusan Piutang	Rp.	
24. Barang Inventaris	Rp	14.920.000	22. Dana Sosial	Rp.	515.000
25. Akumulasi Penyusutan Inventaris	Rp	-6.798.886	23. Dana Pendidikan	Rp.	
Jumlah Aktiva Tetap	Rp	8.121.114	24. Cadangan Lainnya	Rp.	
. Aktiva Lain-lain			25. Pemupukan Modal Gapoktan	Rp.	3.420.700
26. Aktiva lain-lain	Rp		26. SHU Berjalan	Rp.	30.407.304
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp	0	Jumlah Modal Sendiri	Rp.	162.496.004
JUMLAH AKTIVA	Rp	301.667.004	JUMLAH PASIVA	Rp.	301.667.004

Purbalingga , 30 Desember 2013



Staf Pembukuan

Dedi Yulandoro

Mengetahui :
Ketua Gapoktan

NERACA KEUANGAN
LKM RUKUN TANI DESA BRECEK
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
 Per Tanggal 31 Desember 2013

AKTIVA (Alokasi Dana)		PASSIVA (Sumber Dana)	
Aktiva Lancar		Kewajiban Jk. Panjang	
1 Kas	Rp 4.192.000	1 Hutang Dana PNPM	Rp -
2 Bank 1 (BRI)	Rp -	2 Dana Pihak Ke-3	Rp 9.083.000
3 Bank 2 (BPRS)	Rp 16.952.000		
4 Bank (Deposito)	Rp -		
5 Piutang Murabahah	Rp -	Total Kewajiban Lancar	Rp 9.083.000
6 Pendapatan Murabahah Ditangguhkan	Rp -		
7 Pembiayaan Musyarakah	Rp 117.301.000	Kewajiban Jk. Pendek	
8 Penyertaan pada Pihak Lain	Rp -	3 Simpanan Wadiah	Rp 7.846.000
9 Beban Dibayar dimuka	Rp -	4 Simpanan Hari Raya (SHR)	Rp -
10 Penyusutan Beban Dibayar Dimuka	Rp -	5 Simpanan Pendidikan	Rp 1.221.000
11 Persediaan Pupuk & Obat	Rp -	6 Simpanan Qurban	Rp -
12 Persediaan Materai	Rp -	7 Titipan Dana LKM	Rp -
13 Persediaan Deposit PPOB	Rp -	8 Titipan Dana Sosial	Rp -
		-	Rp -
Jumlah Aktiva Lancar	Rp 138.446.000	Total Kewajiban Lainnya	Rp 9.067.000
Aktiva Tetap		Modal Sendiri	
11 Inventaris	Rp 12.000.000	9 Simpanan Pokok	Rp 2.078.000
12 Akumulasi Penyusutan Inventaris	Rp (3.621.333)	10 Simpanan Wajib	Rp 2.643.000
		11 Penyertaan (PUAP)	Rp 100.000.000
Jumlah Aktiva Tetap	Rp 8.378.667	12 Hibah Donatur	Rp -
Aktiva Lain-lain		13 Cadangan Modal	Rp 5.211.833
13 Rupa-rupa Aktiva	Rp -	14 SHU Tahun Lalu	Rp -
		15 SHU Tahun berjalan	Rp 18.740.834
		-	Rp -
Jumlah Aktiva Lain-lain	Rp -	Total Modal Sendiri	Rp 128.673.667
JUMLAH AKTIVA	Rp 146.823.667	JUMLAH PASSIVA	Rp 146.823.667

Brecek, 31 Desember 2013

Manajer LKM-A

Staf Pembukuan



MISHARYAT

MULYONO

SUPARMI

NERACA KEUANGAN
LKMA PUAP DESA GEMURUH KEC. PADAMARA KAB. PURBALINGGA
 Bulan Desember Tahun 2013

AKTIVA		PASIVA	
Aktiva Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
1. Kas	28.186.592	1. Simpanan Lancar	3.771.843
2. bank	28.722.600	2. Simpanan Berjangka	0
3. Piutang dan pembiayaan	74.135.318	3. Dana ZIS	0
4. pedpt. Margin Ditanggungkan	0	4. Dana Lain-lain	100.000.000
5. Peny. Penghapusan Pby	0		
6. Biaya Dibayar Dimuka	0	Jumlah Kw. Jk. Pendek	103.771.843
Jumlah aktiva Lancar	131.044.510	Kewajiban Jangka Panjang	
Aktiva Tetap		5. Dana Pihak ketiga	
7. Inventaris Kantor	6.159.520		
8. Ak. Peny. Inventaris Kantor		Jumlah Kw. Jk. Panjang	
9. Kendaraan			
10. Ak. Peny. Kendraan		Modal sendiri	
11. Gedung Kantor		6. simpanan Pokok	4.710.000
12. Ak. Peny. Gedung Kantor		7. Simpanan Wajib	14.830.000
13. Tanah		8. Simpanan Pemupukan	4.265.400
Jumlah aktiva Tetap	6.159.520	9. SHU Tahun Berjalan	9.626.787
aktiva Lain-lain			
14. Rupa-rupa Aktiva	0	Jumlah Modal sendiri	
Jumlah aktiva lain-lain	0	33.432.187	
Jumlah aktiva	137.204.030	Jumlah Pasiva	137.204.030

Ketua Gapoktan

Suhebi

Gemuruh, 29 Januari 2013



 Manager

 Sigit Era Hartanto

NERACA KEUANGAN
LKMA PUAP Desa Kedungjati Kec. Bukateja
Kab. Purbalingga
Bulan Desember 2013

AKTIVA		PASIVA	
Aktiva lancar		Kewajiban JK Pendek	
1. Kas	27.687.650	1. Simpanan Lancar	80.168.900
2. Bank	855.700	2. Simpanan Berjangka	0
3. Piutang & Pembiayaan	195.310.375	3. Dana Zis	1.347.550
4. Pendpt. Margin Ditanggungkan		4. Dana Pendidikan	400.000
5. Peny. Penghapusan Pby		5. Dana-dana Lain	100.000.000
6. Biaya Dibayar Dimuka			
Jumlah Aktiva Lancar	223853.725	Jumlah Kw JK Pendek	181.916.450
Aktiva Tetap		Modal Sendiri	
7. Invevtaris Kantor	600.000	5. Simpanan Pokok	5.575.000
8. Ak Peny. Invent Kantor	9.000.000	6. Simpanan Wajib	13.676.000
9. Kendaraan		7. Simpanan Pemupukan	5.526.650
10. Ak. Peny. Kendaraan		8. SHU Tahun Berjalan	26.759.625
11. Gedung kantor			
12. Ak. Peny. Gdg Kantor			
13. Tanah			
Jumlah Aktiva Tetap	9.600.000	Jumlah Modal Sendiri	51.537.275
Jumlah Aktiva	233.366.325	Jumlah Pasiva	233.366.325

Purbalingga, 31-12-2013
Mengetahui

Adm. Penbukuan



Muntomah

Manager



Muntomah



LAPORAN LABA - RUGI
LKM-A "MUGI RAHAYU"

Bandingan,Kejobong,Purbalingga , Jawa Tengah

Per : 30 Desember 2013

PENDAPATAN		
Pendapatan bagi hasil/margin/jasa/bunga	Rp.	89.108.690
Pendapatan Administrasi / Provisi	Rp.	8.311.000
Pendapatan Bunga / Jasa bank)	Rp.	
Pendapatan Materai	Rp.	
Pendapatan Denda	Rp.	0
Pendapatan Unit Saprodi	Rp.	
Pendapatan bagi hasil	Rp.	2.895.000
Pendapatan Lainnya	Rp.	300.000
Total Pendapatan :		Rp 100.614.690

BEBAN-BEBAN USAH		
Beban SDM (honor/gaji Karyawan LKM)	Rp.	31.775.000
Beban ATK	Rp.	941.000
Beban Operasional Lainnya	Rp.	955.000
Beban Administrasi	Rp.	
Beban Penyusutan Inventaris	Rp.	6.798.886
Beban Transport Pengurus dan Pengawas	Rp.	100.000
Beban RAT / Pembagian SHU	Rp.	18.770.000
Beban Pelatihan SDM	Rp.	2.250.000
Beban infaq/sosial	Rp.	
Beban Bagi Hasil Tabungan	Rp.	
Beban Bagi Hasil pihak ke-3	Rp.	1.600.000
Beban Lain-lain	Rp.	1.500.000
Beban Administrasi Bank	Rp.	5.517.500
Total Biaya :		Rp 70.207.386

LABA / SHU BERJALAN : Rp 30.407.304

Mengetahui

Purbalingga , 30 Desember 2013

KECAMATAN KEJOBONG

Khaerul Waduha

(Ketua)



Purwanti, A. md

(Manager)

Soim Safaat

(Bendahara)

LAPORAN LABA RUGI
LKM RUKUN TANI DESA BRECEK
KECAMATAN KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA
 Periode : Tanggal 01 Februari 2011 s.d. 31 Desember 2013

PENDAPATAN :

1	Pendapatan Margin Murabahah	Rp	40.270.500
2	Pendapatan Basil Musyarokah	Rp	-
3	Pendapatan Administrasi	Rp	10.159.000
4	Pendapatan Unit Saprodi	Rp	-
5	Pendapatan Bank	Rp	-
6	Pendapatan Jasa PPOB Reknng Listrik	Rp	-
7	Pemupukan modal	Rp	-
8	Dana Sosial	Rp	-
	Total Pendapatan	Rp	50.429.500

BEBAN-BEBAN USAHA :

1	Beban Gaji Karyawan/LKM	Rp	13.362.000
2	Beban ATK	Rp	1.164.500
3	Beban Listrik & Pulsa	Rp	-
4	Beban Administrasi	Rp	741.500
5	Beban Sewa Gedung	Rp	-
6	Beban RAT	Rp	11.040.833
7	Beban Transport dan Perjalanan Dinas	Rp	1.760.000
8	Beban Akumulasi Penyusutan Inventaris	Rp	3.621.333
9	Beban Konsumsi	Rp	-
10	Beban Infaq / Sosial	Rp	-
11	Beban Simpanan/Pinjaman PNPM	Rp	-
12	Penyusutan Beban Dibayar Dimuka	Rp	-
13	Beban Lain-lain	Rp	(1.500)
	Total Beban Blaya	Rp	31.688.666

SHU (SISA HASIL USAHA)	Rp	18.740.834
-------------------------------	-----------	-------------------

Brecek, 31 Desember 2013

Manajer LKM-A

Staf Pembukuan

MISHARYATI

MULYONO



Mengetahui :
Kepala Gapoktan

SUPARMI

REKAPITULASI LABA RUGI TAHUN 2013

PENDAPATAN

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Pendapatan Bag Hasil	4.628.275	4.645.700	4.461.600	4.452.525	4.071.450	4.669.600	4.872.125	4.442.050	4.587.200	4.537.575	4.354.200	5.380.660	55.102.950
2	Pendapatan Administrasi	871.000	847.000	580.000	526.000	505.000	553.000	490.000	340.000	609.000	541.500	766.000	504.200	7.131.700
3	Pendapatan Lain-lain	19000	13000	121900	14500	54.000	17.500	15.000	9.000	14.000	15.000	21.000	89.000	402.900
	Jumlah	5.518.275	5.506.700	5.163.500	4.993.025	4.630.450	5.240.100	5.377.125	4.791.050	5.210.200	5.094.075	5.259.200	5.973.860	62.756.550

BEBAN USAHA

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	Beban Bagasi Simp. Lancar													
2	Beban Bagasi Simp. Banjar gka													
3	Beban Tenaga Kerja	2438275	2438.150	2.286.325	2.251.800	2.084.700	2.324.950	2.402.800	2.157.300	2.321.375	2.289.500	2.309.550	2.654.100	27.988.825
4	Beban Administrasi	30.500	9.000	75.600	12000	23.000	2.000	67.500	51.000	72.500	11.000	37.000	76.000	467.100
5	Beban Urmum	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	392000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000	3.912.000
6	Beban Sewa													0
7	Beban Promosi													0
8	Beban Peringatan Kantor		49.000											49.000
9	Beban Organisasi													0
10	Beban Panyusunan	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	3.600.000
11	Beban Operasional Lain													0
	Jumlah	3.088.775	3.116.150	2.981.925	2.883.800	2.727.700	3.018.950	3.080.300	2.828.300	3.013.875	2.930.500	2.966.550	3.350.100	35.998.925

NO	URAIAN	BULAN												JUMLAH
		JAN	FEB	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUST	SEPT	OKT	NOP	DES	
1	SHU Bulan Ini	2.429.500	2.389.650	2.181.575	2.109.225	1.902.750	2.221.150	2.286.825	1.982.750	2.186.325	2.163.575	2.282.650	2.523.750	24.156.875
2	SHU s/d Bulan Lalu	2.429.500	2.429.500	4.819.050	7.000.625	9.109.850	11.012.600	13.233.750	15.520.575	17.483.325	19.679.650	21.843.225	24.126.875	241.799.625
	Jumlah	4.859.000	4.819.150	7.001.625	9.109.850	11.012.600	13.233.750	16.520.575	17.483.325	19.679.650	21.843.225	24.126.875	241.799.625	



REKAPITULASI LABA - RUGI TAHUN 2013

A. PENDAPATAN

NO	URAIAN	Bulan												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Pendapatan Margin	3460000	4.297.000	4.677.000	4.479.000	4.213.000	4.443.000	5.841.000	4.707.000	7.299.000	6.248.000	8.701.000	8.540.000	66.905.0
2	Pendapatan Administrasi	370.000	382.000	730.000	540.000	345.000	630.000	560.000	570.000	1.440.000	990.000	944.000	610.000	8.111.0
3	Pendapatan Unit Saprodi													
4	Pendapatan Bagi Hasil		320000	200000	100000	200000	800000	700000	50000	50000	475000	500000	400.000	3.795.0
5	Pendapatan Jasa PPOB Rekr. Listrik													3000
6	Pendapatan Lain-lain		300000											
7	Dana Sosial													
	Jumlah	4.130.000	4.999.000	5.607.000	5.119.000	4.758.000	5.873.000	7.101.000	5.327.000	8.789.000	7.713.000	10.145.000	9.550.000	79.111.0

B. BEBAN USAHA

NO	URAIAN	Bulan												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Beban tenaga kerja	1750000	2100000	2.350.000	2.200.000	2.150.000	2.475.000	2.950.000	2.750.000	3.400.000	2.850.000	3.600.000	3.700.000	31.775.0
2	Beban ATK			106.000								785.000		941.0
3	Beban Operasional lain							150.000						4.063.0
4	Beban Administrasi									1.850.000	1.519.500	1.090.000	1.058.000	5.517.5
5	Beban Cadangan Modal													
6	Beban RBT													
7	Beban Transport Pengurus & Pengarah	50.000		100.000			100.000	100.000	50.000	100.000	50.000	100.000	50.000	700.0
8	Beban Amortisasi Penyrtan Inventaris	308.622	250.484	277.320	268.375	277.371	268.375	334.543	311.766	301.708	(2.400.068)	245.042	253.209	696.6
9	Beban Pelatihan SDM				1.210.000	700.000								1.910.0
10	Beban Infaq / Sosial													
11	Beban Bagi Hasil pajak ke-3		600.000											1.600.0
12	Penyrtan Beban Dibayar Dimuka													
13	Beban lain-lain							1.500.000						1.500.0
	Jumlah	2.108.622	2.950.484	2.833.320	3.678.375	3.177.371	2693375	5.034.543	2.611.766	5.651.708	2.019.432	5.820.042	9.974.209	48.703.1

C. SISA HASIL USAHA

NO	URAIAN	Bulan												JUMLAH
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEPT	OKT	NOV	DES	
1	Sisa d. Bulan ini	2.021.378	2.048.516	2.773.680	1.440.635	1.630.679	2.979.625	2.066.457	2.715.234	3.137.292	5.693.568	4.324.958	(474.209)	30.407.8
2	Sisa Bulan lalu		2.021.378	4.069.894	6.843.574	8.284.199	9.914.878	12.894.503	14.960.960	17.676.194	20.813.486	26.507.054	30.832.012	154.818.1
	Jumlah	2.021.378	4.069.894	6.843.574	8.284.199	9.914.878	12.894.503	14.960.960	17.676.194	20.813.486	26.507.054	30.832.012	30.407.803	30.407.8

KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN ANGGOTA
LKM PUAP MUGI RAHAYU DESA BANDINGAN

BULAN	TOTAL	LANCAR	KURANG LANCAR	MACET
DESEMBER 2013	Rp. 263.457.000	Rp. 257.452.000	Rp.3.973.000	Rp.2.032.000
PROSENTASE	100	97,72	1,51	0,77

NO	JUMLAH HARI TUNGGAKAN	PENGGOLONGAN COLL
1	0 Hari	COLL (Lancar)
2	1 s/d 3 Bulan	COLL 2 (kurang lancar)
3	3 s/d 6 Bulan	COLL 1 (macet)



LAPORAN PERKEMBANGAN LKM-A GAPOKTAN PUAP

LKM-A "MUGI RAHAYU"

Bandungan, Kejobong, Purbalingga, Jawa Tengah

Per : 30 Desember 2013

Kabupaten / Kota : Purbalingga

Tahun BLM PUAP : 2010

No.	Nama Gapoktan	Desa	Kecamatan	Simpanan			Pendapatan	Biaya	SHU Bejalar	Modal	Total Aset	Jumlah Pemanfaat
				Pokok	Wejib	Sukarela						
1.	LKM-A "MUGI RAHAYU"	Bandungan	Kejobong	5.940.000	22.212.000	17.572.000	100.614.690	70.207.386	30.407.304	182.495.004	301.667.004	330

Purbalingga, 30 Desember 2013

Mengetahui

Khaerul Waduh
(Ketua Gapoktan)

Soim Safaat
(Bendahara)

Purwanti, A.md
(Manager LKM-A)

**KOLEKTIBILITAS PEMBIAYAAN ANGGOTA
LKMA PUAP GAPOKTAN SUMBER MAKMUR DESA GEMURUH**

BULAN	TOTAL PEMBIAYAAN	LANCAR COL 1	KURANG LANCAR COL 3	MACET COL 4
DESEMBER	74.135.318	56.676.985	9.516.664	7.941.669

JUMLAH BULAN TUNGGAKAN	PENGOLONGAN COLL
0 bulan	COLL 1 (LANCAR)
1 s/d 3 bulan	COLL 2 (KURANG LANCAR)
4 bulan	COLL 3 (MACET)



SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : PURNANTI

Jabatan : MANAGER LKM-A MNGI RAHAYU

Pada Tanggal : 17 JANUARI 2014

Mengenai : Peran LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, Januari 2014

Informan

Penulis


(Purnanti, Agd.)

(Fikri. P.)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : *SIGIT*

Jabatan : *MANAGER CUM-A SUMBER MAKMUR*


Pada Tanggal : *13 JANUARI 2014*

Mengenai : Peran LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, *13* Januari 2014

Penulis



(*Fikri.A*)

Informan



(*Sigit S.H.*)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : *MUIMAH*

Jabatan : *MANAGER LKM-A. SUBUR*

Pada Tanggal : *17 JANUARI 2014*

Mengenai : Peran LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, 17 Januari 2014

Informan

Penulis



(FIKRI. A)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : MIS HARTATI

Jabatan : MANAGER LKM-A. PUKUH TAMI

Pada Tanggal : 20 FEBRUARI 2014

Mengenai : Peran LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, Januari 2014

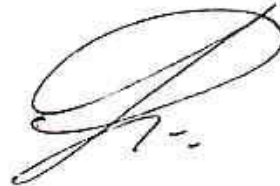
Informan



(MIS HARTATI)



Penulis



(FIKRI A)

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : Sugiarti

Jabatan : Staf Manager LKM-A PUAP SUBUR MAKMUR

Pada Tanggal : 24 Desember 2013

Mengenai : Peran LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, 24 Desember 2013

Informan

Penulis


Sugiarti




Fikri Amrullah

SURAT KETERANGAN

Dengan ini saya,

Nama : Fikri Amrullah

NIM : 09232302

Jurusan : Syariah

Prodi : Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan pihak informan,

Nama : Sari

Jabatan : Penyelia Mitra Tani (PM1)

Pada Tanggal : 24 Desember 2013

Mengenai : manajemen LKM-A PUAP

Menyatakan penelitian ini telah dilakukan dan benar-benar apa yang dapat dari penelitian tidak kebohongan dan penyaduran.

Purbalingga, 24 Desember 2013

Informan

Penulis



Sari



Fikri Amrullah

**HASIL ALAT PENGUMPULAN DATA
PENELITIAN LKM-A PUAP KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN
2013**

Dibawah ini spesifikasi alat pengumpulan data dari beberapa bahan yang didapatkan penulis, serta jawaban pernyataan yang didapat untuk memenuhi kelengkapan sebagai bukti validasi hasil penelitian tersebut, yaitu :

1. Pedoman Observasi

No	Kebutuhan Observasi	Bukti Data	Keterangan
1	Sejarah singkat LKM-A PUAP	Pengamatan Sejarah.	-
2	Visi dan Misi	Pengamatan.	-
3	Letak Geografis	Pengamatan keadaan lokasi.	-
4	Struktur Organisasi	Pengamatan posisi karyawan dengan garis intruksi.	-

2. Pedoman Dokumen

No	Kebutuhan Observasi	Bukti Data	Keterangan
1	Sekim produk LKM-A PUAP	Dokumentasi	-
2	Model pembiayaan kepada IMKM	Dokumentasi	-
3	Model pembinaan dan	Dokumentasi laporan	-

	pendampingan usaha kepada UMKM	tahunan LKM-A PUAP	
4	Skim pembiayaan bermasalah	Dokumentasi Laporan Tahunan LKM-A PUAP	-
5	Sistem kerjasama internal bank dengan instansi lain	Dokumen tasi akses usaha kecil terhadap dana LKM-A PUAP	-

3. Pedoman Wawancara

No	Kebutuhan Observasi	Hasil Ringkasan Jawaban
1	Apa yang melatarbelakangi didirikannya LKM-A PUAP di Kabupaten Purbalingga?	<p>-Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi Petani dan UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti perbankan.</p> <p>-Menumbuhkan kelembagaan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) yang mampu melakukan fasilitasi "intermediasi" usaha Kelompok Tani (POKTAN) dan Petani anggotanya dalam hal utamanya "permodalan", dan bukan menyaingi usaha anggota, sehingga arah</p>

		kegiatannya lebih kepada fungsi jasa keuangan/ Lembaga Keuangan Mikro (Unit Keuangan Mikro/LKM) yang profesional, mandiri dan mengakar di masyarakat.
2	Bagaimana alur yang dilakukan nasabah petani, pengusaha mikro, kecil dan menengah untuk dapat mengajukan pembiayaan kepada LKM-A PUAP dari permohonan sampai droping?	Datang ke kantor LKM-A PUAP dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan, calon nasabah harus membuat RUA/RUK (Rencana Usaha Anggota atau Kelompok) dan bersedia disurvei.
3	Bagaimana pembinaan dan pendampingan usaha kepada nasabah UMKM setelah melakukan pembiayaan?	Melelui survai ke lapangan mengenai usaha mitra dengan waktu yang tidak ditentukan, tanpa diketahui nasabah, adapun yang dilakukan disana yaitu memberikan konsultasi-konsultasi mengenai usaha, dengan memberikan solusi.
4	Langkah-langkah apa saja yang dilakukan	Melakukan updeting data pembiayaan katagori macet (mengalami permasalahan)

	LKM-A PUAP jika di temui para UMKM yang melakukan pembiayaan mengalami permasalahan?	dan berdasarkan data tersebut LKM-A PUAP menerbitkan surat tagihan yang ditandatangani oleh Manajer dengan tembusan gapoktan dan team teknis kabupaten bila perlu.
5	Bentuk perhatian (peran) seperti apa yang dilakukan LKM-A PUAP agar petani dan UMKM dapat berkembang?	Adanya pendampingan usaha terhadap mitra dan arahan usaha yang dijalankan mitra, serta memberikan solusi mengenai usaha yang sedang digeluti si mitra.
6	Apa yang menjadi kekuatan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan LKM-A PUAP (Baik dari sisi pelaku LKM-A dan dari sisi pelaku petani dan UMKM)?	Penggunaan sistem bagi hasil dan lebih menggunakan untuk usaha yang produktif.
7	Apa yang menjadi kelemahan untuk mengembangkan ekonomi pedesaan UMKM (baik dari sisi	Kurangnya pemahaman kesyarifahan dan kemampuan dibidang perbankan serta fasilitas teknologi yang masih minim.

	pelaku LKM-A dan dari sisi pelaku petani dan UMKM?	
8	Apasaja peluang LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga dalam upaya mengembangkan Pertanian dan UMKM?	Pangsa pasar yang masih terbuka lebar karena mayoritas penduduk Indonesia sebagian besar muslim dan berprovesi sebagai petani.
9	Apasaja ancaman LKM-A PUAP di kabupaten Purbalingga dalam upaya mengembangkan Pertanian Dan UMKM	Pesaingan dari lembaga sejenis dan perbankan kususnya perbankan syariah serta konvensional yang ada di pedesaan

BUPATI PURBALINGGA

KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 893.3/70.1 TAHUN 2011
TENTANG

PENETAPAN PENYULUH PENDAMPING DAN GABUNGAN KELOMPOK TANI
(GAPOKTAN) PENERIMA PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS
PERDESAAN (PUAP) KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2010

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program pengembangan usaha agribisnis perdesaan (PUAP), maka perlu adanya penyuluh Pendamping dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Desa-desa penerima dana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan di Kabupaten Purbalingga sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts./OT.140/8/2010 Tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat-Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP) dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3045/Kpts./OT.140/9/2010 Tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penyuluh Pendamping Dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga Tahun 2010;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

u

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29/Permentan/OT.140/3/2010 Tanggal 8 Maret 2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 146.1/kpts.320/3/2007 tanggal 1 Maret 2007 tentang hasil seleksi pengadaan THL-TBPP dan POPT-PHP Departemen Pertanian;
11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2838/Kpts./OT.140/8/2010 tanggal 13 Agustus 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (BLM-PUAP);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3045/Kpts./OT.140/9/2010 Tanggal 3 September 2010 tentang Penetapan Desa dan Gapoktan Penerima Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Tahap Kedua Tahun Anggaran 2010;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga, dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan ini.

- KEDUA** : Tugas Penyuluh Pendamping Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah :
- Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
 - Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
 - Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) selama proses penumbuhan kelembagaan;
 - Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
 - Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
 - Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfaatan dana BLM-PUAP;
 - Mambantu Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dalam membuat laporan perkembangan PUAP.
- KETIGA** : Tugas Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah :
- Memfasilitasi penyusunan Rencana Usaha Anggota (RUA) dan Rencana Usaha Kelompok (RUK);
 - Menyusun Rencana Usaha Bersama (RUB);
 - Menyalurkan Dana BLM-PUAP untuk modal kegiatan Agribisnis kepada anggota dalam bentuk simpan pinjam;
 - Membina dan mengawasi serta melaporkan perkembangan pelaksanaan PUAP;
 - Membentuk Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A).
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Penyuluh Pendamping Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga, Pengurus Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) Penerima Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Kabupaten Purbalingga bertanggungjawab kepada Bupati Purbalingga melalui Tim Teknis Kabupaten.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 4 Maret 2011
BUPATI PURBALINGGA,

HERU SUDJATMOKO

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
- Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
- Kepala BPTP Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
- Badan Koordinasi Penyuluh Provinsi Jawa Tengah di Semarang;

5. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Jawa Tengah di Ungaran;
6. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga;
7. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Purbalingga;
8. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Purbalingga;
9. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga;
10. Semua Anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 893.3 / 70.1 TAHUN 2011
 TANGGAL 4 MARET 2011

PENETAPAN PENYULUH PENDAMPING PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
 AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) TAHUN ANGGARAN 2010
 KABUPATEN PURBALINGGA

NO.	D E S A /KECAMATAN	NAMA PENYULUH PANGKAT/GOL.RUANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Desa Kabunderan, Kecamatan Karanganyar	KURNIAWATI	THL-TBPP 09
2.	Desa Kertanegara, Kecamatan Kertanegara	NENSI UTAMI	THL-TBPP 09
3.	Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari	LAILY FITRIASTUTI, A.Md. Pengatur Tingkat I (II/d)	PNS
4.	Desa Brecek, Kecamatan Kaligondang	MALIKHATUS S, A.Md. Pengatur Tingkat I (II/d)	PNS
5.	Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong	MOHAMAD RIDWAN	THL-TBPP 09
6.	Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon	NUR RAHMAT	THL-TBPP 08
7.	Desa Condong, Kecamatan Kertanegara	KHAMIM, S, ST. Penata Muda Tingkat I (III/b)	PNS
8.	Desa Karangklesem, Kecamatan Kutasari	LIDA ANDINA, A.Md.	THL-TBPP 09
9.	Desa Bojong, Kecamatan Mrebet	TOFIK HIDAYAT	THL-TBPP 09
10.	Desa Gemuruh, Kecamatan Padamara	ANGGORO YEKTI Pengatur Tingkat I (II/d)	PNS
11.	Desa Kalapacung, Kecamatan Bobotsari	PUJI PRIANTO, S.Pt.	THL-TBPP 08
12.	Desa Brobot, Kecamatan Bojongsari	REZA ANGGRAHENI S.	THL-TBPP 08
13.	Desa Galuh, Kecamatan Bojongsari	ENDRO SUGIARTO, S.ST. Penata Muda Tingkat I (III/b)	PNS
14.	Desa Kedungjati, Kecamatan Bukateja	TEGUH PRIHANTORO	THL-TBPP 09
15.	Desa Cilapar, Kecamatan Kaligondang	SUMARNA, S.ST. Penata Tingkat I (III/d)	PNS
16.	Desa Kembaran Wetan, Kecamatan Kaligondang	AGUS CAHYADI, S.Pt.	THL-TBPP 08
17.	Desa Kalimanah Kulon, Kecamatan Kalimanah	DYAH YAYU W, A.Md.	THL-TBPP 07
18.	Desa Buara, Kecamatan Karanganyar	BANGUN WISMO H.	THL-TBPP 09
19.	Desa Danasari, Kecamatan Karangjambu	NIADA ISMAN MADE	THL-TBPP 09
20.	Desa Karangsari, Kecamatan Karangmoncol	SUDARSO	THL-TBPP 08
21.	Desa Karangreja, Kecamatan Karangreja	IKA SEPTI PRATIWI	THL-TBPP 08
22.	Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong.	SURATNO	THL-TBPP 08
23.	Desa Kalialang, Kecamatan Kemangkon.	LATIF GHAMZAWI	THL-TBPP 08

1	2	3	4
24.	Desa Karangemiri, Kecamatan Kemangkon.	ERIEK WIBOWO	THL-TBPP 09
25.	Desa Darma, Kecamatan Kertanegara	SALBIKARTO, A.Md. Penatur Tingkat I (II/d)	PNS

